

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN UPAH MINIMUM
TERHADAP KEMISKINAN DI PULAU JAWA TAHUN 2006-
2014**

**SILVIA ANDRIANI
8105112282**



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2016**

**THE INFLUENCE OF EDUCATION LEVEL AND MINIMUM
WAGE TO POVERTY IN JAVA ISLAND ON 2006-2014**

**SILVIA ANDRIANI
8105112282**



**Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Education/Economic
Accomplishment**

**STUDY PROGRAM EDUCATION OF ECONOMICS
CONCENTRATION IN EDUCATION OF COOPERATIVE
ECONOMICS
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND ADMINISTRATION
FACULTY OF ECONOMICS
STATE UNIVERSITY OF JAKARTA
2016**

ABSTRAK

Silvia Andriani 8105112282. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2006-2014. Jakarta : Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan di pulau Jawa tahun 2006-2014. Pulau Jawa dipilih menjadi objek penelitian dikarenakan menyajikan data lengkap yang dapat digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan dan upa minimum secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di pulau Jawa. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel tingkat pendidikan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kemiskinan dan variabel upah minimum juga berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di pulau Jawa.

Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini adalah sebesar 0,361 yang berarti sebesar 36,1% kemiskinan dapat dijelaskan oleh tingkat pendidikan dan upah minimum.

Kata Kunci: *Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Kemiskinan, Pulau Jawa.*

ABSTRACT

Silvia Andriani 8105112282. The Influence of Education Level and Minimum Wage to Poverty in Java Island on 2006-2014. Jakarta: Concentration Education Cooperative Economics, Economics of Education Studies Program, Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, in 2016.

This study aims to determine the influence of education level minimum wage to poverty in Java Island on 2006-2014. Java was chosen as the research object because it present complete data that can be used in research.

Based on the results it can be concluded that the F test for the education level and minimum wage variables simultaneously affect the number of poverty in Java Island. And based on the t-test results it can be concluded that partially variable of education level has a significant negative effect on poverty and variable of minimum wage alsoa has a significant negative effect on poverty in the Java island.

The coefficient of determination in this study amounted to 0,361, which means 36,1% of Poverty amount can be explained by the education level and minimum wage.

Keywords: *Education Level, Minimum Wage, Poverty, Java Island.*

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus
NIP. 19671207 199203 1001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Karuniana Dianta A.S, S.IP, ME</u> NIP. 19800924 200812 1002	Ketua Penguji		28/1/2016
2. <u>Dicky Iranto, SE, M.Si</u> NIP 19710612 200112 1001	Sekretaris		28/1/2016
3. <u>Sri Indah Nikensari, SE, M.Si</u> NIP 1962089 199003 2001	Penguji Ahli		2/2/2016
4. <u>Ari Saptono, SE, M.Pd</u> NIP 19720715 200112 1001	Pembimbing I		28/1/2016
5. <u>Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si</u> NIP 19720114 199802 2001	Pembimbing II		28/1/2016

Tanggal Lulus: 26 Januari 2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas tercantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 28 Januari 2016

Yang membuat pernyataan



Silvia Andriani

8105112282

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan baginya jalan ke luar (bagi semua urusannya). Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (segala keperluan)nya, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu” (QS Ath-Thalaaq:2-3).

“Saat ikhtiar sudah di garis batas, maka biarkan do’a dan takdir bertarung di langit”

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia serta kemudahan yang tiada berbatas Engkau berikan kepadaku dalam penyelesaian skripsi ini.

Teruntuk Ibu dan Bapak tercinta, sebagai tanda bakti dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, kupersembahkan skripsi ini kepada Ibu dan Bapak atas segala kasih dan sayangmu. Yang tiada pernah lelah dan berhenti memanjatkan do’a untuk kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga setiap tetes air mata yang jatuh dari mata Ibu dan Bapak atas segala kepentinganku. Menjadi sungai untuk kalian di Surga nanti. Aamiin...

Untuk adikku tersayang, Yunita Ratna Sari. Terimakasih untuk setiap do’a dan semangat yang tiada henti kau berikan. Semoga Allah senantiasa memudahkan setiap urusan dalam penyelesaian masa studimu. Aamiin..

Muhammad Deri Fauzi, terimakasih telah menjadi penyemangat yang baik, yang sering mengingatkan untuk perjuangkan mimpi yang harus segera menjadi nyata. Semoga Allah senantiasa memudahkan setiap urusanmu.

Dan terimakasih kepada para sahabat atas kebersamaan, yang tiada lelahnya memberikan motivasi, do’a serta semangat yang luar biasa.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan, karunia dan rahmat dalam penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2006-2014”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Atas semua itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Ari Saptono, SE, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, menyarankan, membantu, dan memotivasi penulis menyelesaikan skripsi dengan penuh kesabaran.
2. Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II dan Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan masukan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
3. Karuniana Dianta A.Sebayang, S.IP, ME, selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi dan Penasehat Akademik yang tiada henti-hentinya mengingatkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi Universitas Negeri Jakarta.
5. Seluruh dosen Pendidikan Ekonomi Koperasi Universitas Negeri Jakarta yang telah membimbing, mendidik dan memberikan motivasi belajar kepada peneliti selama berada di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
6. Kedua Orang tua dan adikku Yunita Ratna Sari yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a dan memberikan motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. M Deri Fauzi, yang telah membantu do'a, semangat dan terus mengingatkan akan mimpi menjadi sarjana yang harus segera diselesaikan sesulit apapun keadaannya.
8. Amin Harina, Thooyibah Islammiyah, Mutia Sari, Siti Saptari Q, Mira Salni Nasution, Amin Shodik dan Rita Kartika Sari yang tak pernah bosan menyemangati, memotivasi dan mengingatkan segala perjuangan yang harus segera diselesaikan, serta do'a yang terus terpanjatkan untuk kelancaran skripsi penulis.
9. Teman - teman Pendidikan Ekonomi Koperasi Reguler 2011 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
10. Teman – teman KAHM At-Taubah yang senantiasa membantu do'a dan semangat untuk segala kemudahan dan kelancaran penyelesaian skripsi penulis.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam pelaksanaan maupun penyusunan skripsi ini, maka dapat dikatakan begitu banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan dalam proses penyempurnaan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca umumnya, sebagai peningkatan pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Ekonomi.

Jakarta, Januari 2016

Silvia Andriani

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah	11
E. Kegunaan Penelitian	12
BAB II. KAJIAN TEORETIK	13

A.	Deskripsi Konseptual.....	13
1.	Kemiskinan	13
2.	Tingkat Pendidikan	24
3.	Upah Minimum	28
B.	Hasil Penelitian yang Relevan	34
C.	Kerangka Teoretik	37
D.	Perumusan Hipotesis	41
BAB III.	METODOLOGI PENELITIAN	42
A.	Tujuan Penelitian	42
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	42
C.	Metode Penelitian	42
D.	Jenis dan Sumber Data	43
E.	Operasionalisasi variabel Penelitian	44
F.	Konstelasi Hubungan Antar Variabel.....	45
G.	Teknik Analisis Data	46
BAB IV	PEMBAHASAN.....	57
A.	Deskripsi Data.....	57
B.	Pengujian Hipotesis	63
C.	Pembahasan Penelitian	71
BAB V	KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI.....	75
A.	Kesimpulan	75

B. Implikasi	75
C. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel I.1	Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia.....	2
Tabel I.2	Jumlah Penduduk Miskin di Beberapa Pulau Besar	3
Tabel I.3	Rata-Rata Lama Sekolah.....	6
Tabel I.4	TPAK di Beberapa Pulau Indonesia.....	8
Tabel II.1	Jenjang Pendidikan dan Lama Sekolah yang digunakan untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah...	29
Tabel IV.1	Persentase Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006-2014.....	57
Tabel IV.2	Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006-2014.....	59
Tabel IV.3	Upah Minimum menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006-2014.....	61
Tabel IV.4	Tabel Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	64
Tabel IV.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas	65
Tabel IV.6	Pengujian Signifikansi Common Effect/Fixed Effect.....	67
Tabel IV.7	Pengujian Signifikansi Fixed Effect/Random Effect.....	68
Tabel IV.8	Hasil Uji t.....	68
Tabel IV.9	Hasil Uji F.....	70
Tabel IV.10	<i>Intercept</i> Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa.....	73

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar I.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Jawa Tahun 2007-2014	9
Gambar IV.1	Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa berdasarkan Provinsi Tahun 2006-2014.....	58
Gambar IV.2	Rata-Rata Lama Sekolah menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006-2014.....	60
Gambar IV.3	Upah Minimum menurut provinsi di pulau Jawa Tahun 2006-2014.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Data Variabel Penelitian.....	84
Lampiran 2	Data Ln Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	86
Lampiran 3	Tabel Statistik deskriptif Variabel Penelitian.....	87
Lampiran 4	Uji Normalitas.....	88
Lampiran 5	Uji Heteroskedastisitas.....	89
Lampiran 6	Regresi Data Panel dengan Model <i>Common Effect</i>	90
Lampiran 7	Regresi Data Panel dengan Model <i>Fixed Effect</i>	91
Lampiran 8	Regresi Data Panel dengan Model <i>Random Effect</i>	92
Lampiran 9	Uji Chow.....	93
Lampiran 10	Uji Hausman.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional negara Indonesia salah satunya sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan ekonomi adalah salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk membentuk negara yang adil dan makmur, dan kemiskinan menjadi salah satu isu sentral yang menjadi tujuan utama pembangunan ekonomi. Isu sentral tersebut tidak hanya berlaku di negara Indonesia, melainkan hampir di seluruh negara.

Hal tersebut dapat tercermin dalam penyetujuan dari 189 negara anggota PBB termasuk Indonesia pada bulan September tahun 2000 untuk mengurangi setengah dari jumlah masyarakat miskin secara universal pada tahun 2015 sebagai target Millennium Development Goals (MDGs).¹ Kemiskinan menjadi salah satu masalah dalam perekonomian di hampir setiap negara, terlebih lagi di negara berkembang seperti Indonesia yang masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara sekitarnya. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk padat tidak dapat terhindar dari masalah tersebut. Ini dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang begitu besar.

¹Annisa Rahmayanti, "*Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia*", Kompasiana (http://www.kompasiana.com/nissa96/pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia_5528dc9ff17e61a3118b45b4, diakses pada 2 Mei 2015).

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 2007-2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin di Kota + Desa (%)
	Kota	Desa	Kota + Desa	
2007	13.559,30	23.609,00	37.168,30	16,58
2008	12.768,50	22.194,80	34.963,30	15,42
2009	11.910,50	20.619,40	32.530,00	14,15
2010	11.097,80	19.925,60	31.023,40	13,33
2011	11.046,75	18.972,18	30.018,93	12,49
2012	10.507,80	18.086,90	28.594,60	11,66
2013	10.634,47	17.919,46	28.553,93	11,47
2014	10.356,69	17.371,09	27.727,78	10,96

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel I.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk miskin di Indonesia tiap tahunnya mengalami penurunan, meskipun terdapat penurunan namun jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 yaitu 27.727.780 jiwa masih menunjukkan angka kemiskinan yang cukup besar.

Indonesia memiliki beberapa pulau besar, dan jumlah penduduk miskin tersebut jika diklasifikasikan berdasarkan pulau-pulau besar di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.2
Jumlah Penduduk Miskin di Beberapa Pulau Besar Indonesia
Tahun 2007-2014

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin di Kota + Desa (000)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sumatera	7.845,40	7.294,00	6.854,20	6.652,70	6.451,67	6.177,20	6.190,06	6.070,42
Jawa	21.095,80	19.975,90	18.429,00	17.182,60	16.726,99	15.822,60	15.546,93	15.143,78
Bali & NT	2.511,30	2.394,60	2.245,70	2.198,40	2.073,90	1.989,60	1.998,13	2.004,45
Kalimantan	1.352,90	1.214,10	1.015,90	1.018,00	969,54	254,50	978,71	972,92
Sulawesi	2.788,10	2.608,50	2.490,10	2.347,00	2.144,57	2.045,60	2.139,58	2.054,83
Kep Maluku	514,60	496,40	478,00	469,70	457,63	427,20	408,33	391,81
Papua	1.060,20	979,60	1.017,10	1.017,90	1.194,63	1.199,60	1.292,21	1.089,58

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel I.2 di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin terbesar berada di pulau jawa. Jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk miskin yang tersebar di 6 provinsi diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Besarnya jumlah penduduk miskin di pulau jawa tersebut dikarenakan pulau jawa merupakan pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia.

Besarnya jumlah penduduk miskin di pulau jawa tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah pengeluaran pemerintah sektor publik yang dikhususkan pada pendidikan dan kesehatan. Dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diungkapkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi

individu demi tercapainya kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pendidikan diselenggarakan untuk mencapai kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Pelaksanaan pendidikan yang berkualitas tersebut dilakukan dengan cara memberikan jaminan tentang pembiayaan pendidikan. Dan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang berkualitas, pemerintah menetapkan anggaran dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD. Alokasi anggaran pendidikan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada 13 februari 2015 mencapai Rp 408,5 triliun atau 20,59 persen dari total belanja negara, yang dianggarkan melalui belanja Pemerintah Pusat Rp 154,3 triliun serta yang melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, sebesar Rp 254,1 triliun.² Anggaran dari total belanja pemerintah pusat dan daerah pada bidang pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di pulau jawa.

Anggaran pendidikan merupakan anggaran tertinggi dibandingkan anggaran lainnya. Akan tetapi, anggaran 20 persen tersebut masih belum digunakan dengan baik, sehingga masih banyak penduduk pulau jawa yang belum bisa mengakses pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Sehingga pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan masih perlu diperhatikan terkait dengan penggunaannya agar harapannya dalam mengentaskan kemiskinan dapat tercapai.

Selain sektor pendidikan, sektor kesehatan juga perlu mendapat sorotan lebih dari pemerintah. Sudaryatmo mengatakan, dari sisi politik anggaran

²“Berapa Anggaran Pendidikan Pada APBN-2015?”, APBN News (<http://apbnnews.com/artikel-opini/anggaran-pendidikan-apbnp-2015/>, diakses pada 12 Mei 2015).

kesehatan dan pendidikan, komitmen pemerintah Indonesia dibanding negara lain masih ketinggalan. Ini terlihat dari alokasi untuk pendidikan dan kesehatan dari total Produk Domestik Bruto (GDP), Indonesia paling rendah dari negara lain yaitu 2%. Sedangkan Kamboja 4%, Laos mendekati 5%, Malaysia 10%, Philipina 15% dan Thailand hampir 7%.³ Bank Dunia juga menyebut alokasi dana kesehatan Indonesia merupakan salah satu yang terendah di dunia. Posisi Indonesia hanya kalah dari Sudan Selatan, Chad, Myanmar, dan Pakistan.⁴

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian atau keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya, yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Indikator tingkat pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Saat ini tingkat pendidikan Indonesia tergolong masih rendah. Laporan United Nations Development Programme (UNDP) pada 2014 menyebutkan, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia hanya 7,5 tahun. Capaian ini jauh di bawah sejumlah negara ASEAN.⁵ Ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah belum cukup berhasil. Rendahnya tingkat pendidikan pada Pulau Jawa juga terlihat dari perkembangan rata – rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Pulau Jawa pada tabel di bawah ini :

³ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia “*Komitmen Pemerintah Terhadap Kesehatan Dinilai Masih Lemah*”, Suara Pembaruan (<http://www.suarapembaruan.com/home/komitmen-pemerintah-terhadap-kesehatan-dinilai-masih-lemah/29170>, diakses pada 2 Juni 2015)

⁴ “*Anggaran Kesehatan Indonesia Salah Satu yang Terendah di Dunia*”, KataData-news and research (<http://katadata.co.id/berita/2015/02/18/anggaran-kesehatan-indonesia-salah-satu-yang-terendah-di-dunia#sthash.1RnPV0v0.dpbs>, diakses pada 5 Juni 2015)

⁵ Erika Octaviana, “*MEA di Depan Mata, Indonesia Terancam Jadi Penonton*”, Okezone.com (<http://news.okezone.com/read/2015/06/07/337/1161353/mea-di-depan-mata-indonesia-terancam-jadi-penonton>, diakses pada 10 Juni 2015).

Tabel I.3
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Tahun 2014

Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
DKI Jakarta	10,99	10,28	10,63
Jawa Barat	8,58	7,80	8,19
Jawa Tengah	7,92	7,11	7,51
DI Yogyakarta	9,91	9,01	9,45
Jawa Timur	8,13	7,11	7,61
Banten	9,07	8,17	8,63
Rata-Rata	9,10	8,24	8,67

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel I.3 di atas, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta merupakan dua provinsi yang memiliki nilai rata-rata lama sekolah diatas wajib belajar 9 tahun yakni dengan angka 10,63 dan 9,45. Namun rata-rata lama sekolah di empat provinsi lainnya masih di bawah 9 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk Pulau Jawa masih tergolong rendah, yakni masih di bawah target wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Kondisi demikian akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah, khususnya pulau Jawa, karena dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan meningkatkan keterampilan atau keahlian seseorang dan dengan semakin meningkatnya keterampilan atau keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Rendahnya pendapatan per kapita juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di pulau Jawa. Menurut data BPS mengenai distribusi ketimpangan pendapatan per kapita di Pulau Jawa pada tahun 2012 menunjukkan bahwa provinsi DKI Jakarta menduduki urutan pertama dengan jumlah pendapatan per kapita sebesar Rp 114.879.524,00 di pulau Jawa. disusul Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 26.729.127,00 Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 21.992.542,00 Provinsi Banten Rp 20.020.098,00 dan dua Provinsi terakhir berturut-turut adalah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan pendapatan per kapita sebesar Rp 17.184.507,00 dan Rp 16.495.777,00.⁶

Berdasarkan data tersebut terdapat ketimpangan pendapatan per kapita antara provinsi yang mayoritas berada di perkotaan dengan di perdesaan. Provinsi DKI Jakarta yang merupakan wilayah perkotaan memiliki pendapatan per kapita jauh lebih besar daripada provinsi lain di Pulau Jawa, bahkan DKI Jakarta menempati urutan kedua tingkat Nasional setelah Kalimantan Timur. Ketimpangan pendapatan per kapita masyarakat tersebut menyebabkan banyaknya jumlah penduduk miskin di pulau Jawa khususnya di daerah perdesaan, karena dengan pendapatan per kapita yang rendah menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan di pulau jawa adalah rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Banyaknya jumlah penduduk yang berusia produktif di Indonesia tidak diimbangi

⁶ Vincent Gaspersz, “*Ketimpangan Distribusi Pendapatan Penduduk dan Produktivitas di Indonesia*”, Kompasiana (http://www.kompasiana.com/vincentgaspersz07121958/ketimpangan-distribusi-pendapatan-penduduk-dan-produktivitas-di-indonesia_54f6e98ba33311b5408b4973, diakses pada 3 Juni 2015).

dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang ada. Sehingga penduduk berusia produktif tersebut menambah jumlah pengangguran dan kemudian berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2013, menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di beberapa pulau Indonesia sebagai berikut:

Tabel I.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Beberapa Pulau Indonesia
Tahun 2012 - 2014 (Data diterbitkan per bulan Februari)

Pulau	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)		
	2012	2013	2014
Sumatera	70,45	70,46	69,39
Jawa	69,34	68,58	68,77
Bali & Nusa Tenggara	73,82	74,46	74,45
Kalimantan	72,36	71,63	71,83
Sulawesi	69,35	67,60	68,07
Kepulauan Maluku	67,40	67,60	66,64
Papua	75,77	74,00	75,80

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada tabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di beberapa pulau Indonesia terlihat bahwa TPAK tertinggi pada tahun 2014 berada di pulau Papua sebesar 75,80 persen. Angka tersebut disusul dengan pulau Bali dan Nusa Tenggara yang menempati TPAK tertinggi kedua yaitu sebesar 74,45 persen. Urutan ketiga ditempati oleh pulau Kalimantan dengan persentase sebesar

71,83 persen. Pulau Sumatera menempati urutan keempat dengan persentase sebesar 69,39 persen. Sedangkan pulau Jawa yang merupakan pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia hanya mampu berada pada urutan kelima dengan jumlah 68,77 persen. Kemudian urutan TPAK berikutnya ditempati oleh Sulawesi dan Kepulauan Maluku berturut-turut sebesar 68,07 dan 66,64 persen.

Rendahnya TPAK di Pulau Jawa mengindikasikan bahwa masih cukup rendahnya jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa jika dibandingkan dengan penduduk usia kerja di Pulau Jawa. Ditambah lagi dengan penurunan angka pada tahun 2013 sebesar 0,76 persen. Rendahnya angkatan kerja tersebut bisa disebabkan karena cukup tingginya bukan angkatan kerja dimana sebagian besar penduduk di Pulau Jawa masih banyak yang termasuk golongan bersekolah atau golongan ibu rumah tangga.

Tingginya tingkat pengangguran juga menyebabkan tingginya kemiskinan di pulau jawa. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang. Ketiadaan pendapatan juga menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Akibat jangka panjang adalah menurunnya PDRB dan PDRB per kapita serta meningkatnya kemiskinan di pulau jawa.

Tiga provinsi di Pulau Jawa dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada Februari 2012 adalah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, berturut-turut sebesar 10,74 persen 10,72 persen, dan 9,78 persen. Setahun kemudian, Februari 2013, ketiga provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi tidak mengalami

perubahan posisi, yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, masing-masing sebesar 10,10 persen, 9,94 persen, dan 8,90 persen.⁷

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah rendahnya upah minimum buruh Pulau Jawa. Pada tahun 2014 upah minimum di beberapa provinsi pulau jawa menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah upah minimum terbesar yaitu Rp 2.441.301,- disusul oleh provinsi Banten sebesar Rp 1.325.000,- Jawa Barat dan Jawa Timur sebesar Rp 1.000.000,- dan dua provinsi dengan upah minimum terendah ditempati oleh Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang bahkan juga merupakan dua provinsi dengan upah minimum terendah tingkat nasional.⁸ Dan pada tahun 2015 terdapat empat provinsi yang tidak menetapkan upah minimum provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.⁹

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, terlihat beberapa masalah yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Pulau Jawa, di antaranya adalah:

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor publik terhadap kemiskinan di Pulau Jawa
2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

⁷Fatkul Maskur, "10 Provinsi Dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi", *Bisnis.com* (<http://industri.bisnis.com/read/20130901/12/160039/inilah-10-provinsi-dengan-tingkat-pengangguran-tertinggi>, diakses pada 1 Juni 2015).

⁸"Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014", *Gajimu.com* (<http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-minimum/ump-2014>, diakses pada 2 Juni 2015).

⁹Nurseffi Dwi Wahyuni, "Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia", *Liputan6.com* (<http://bisnis.liputan6.com/read/2138489/daftar-lengkap-ump-2015-di-seluruh-indonesia>, diakses pada 2 Juni 2015).

3. Pengaruh pendapatan per kapita terhadap kemiskinan di Pulau Jawa
4. Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap kemiskinan di Pulau Jawa
5. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Pulau Jawa
6. Pengaruh tingkat upah minimum terhadap kemiskinan di Pulau Jawa

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya membahas:

1. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.
2. Pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Pulau Jawa
3. Pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

D. Perumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan pembatasan masalah yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa?
2. Apakah terdapat pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Pulau Jawa?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Pulau Jawa?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini baik secara teoretis maupun praktis memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menambah referensi informasi serta khasanah ilmu tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi kemiskinan, khususnya mengenai tingkat pendidikan dan upah minimum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya, serta penelitian ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi mengenai kemiskinan dalam kaitannya dengan tingkat pendidikan dan upah minimum.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Keberhasilan berbagai program pembangunan suatu pemerintahan adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin. Karena hakekatnya pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata sesuai amanat UUD 1945 kepada pemerintah yang berkuasa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemiskinan seringkali dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Berbagai program telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, tetapi secara statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cenderung besar.

Menurut Badan Pusat Statistik¹⁰, Kemiskinan adalah :

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Definisi yang serupa menurut Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*) yang dikemukakan kembali oleh Hari Susanto¹¹ terkait kemiskinan, “*Poverty is a deprivation of essential assets and opportunities to which every*

¹⁰bps.go.id, “Kemiskinan”

(<http://dds2.bps.go.id/Subjek/view/id/23>, diakses pada 3 Juni 2015).

¹¹ Hari Susanto, *Dinamika Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta : Khanata, Pustaka LP3ES, 2006), p. 34.

human entitled.” (Kemiskinan adalah kekurangan aset-aset penting dan kesempatan yang menjadi hak setiap manusia).

Lincoln Arsyad¹² juga mengemukakan kemiskinan yang didefinisikan oleh Bappenas sebagai: “suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.” Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan keadaan dimana tingkat pendapatan penduduk berada di bawah garis kemiskinan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari.

Menurut Ravallion dalam Lincoln Arsyad¹³, mengemukakan bahwa kemiskinan adalah:

kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

Arsyad¹⁴ menyatakan secara garis besar definisi miskin dapat dipilah menjadi dua aspek, yaitu:

1. Aspek primer, yaitu berupa miskin aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan, dan
2. Aspek sekunder, yaitu berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.

Berdasarkan pendapat tersebut, masyarakat miskin identik dengan kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan

¹² Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta, p. 299.

¹³ *Ibid.*, p. 299-300.

¹⁴ *Ibid.*

dasar baik dalam melakukan kegiatan usaha produktif maupun menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi.

b. Kriteria Kemiskinan

Pendapat Kartasasmita¹⁵ yang diungkapkan oleh Irdam Ahmad dan Ilyas

Saad terkait kemiskinan yaitu :

jika dikaitkan dengan tingkat pendapatan kemiskinan bisa dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Sedangkan dari aspek penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu kemiskinan natural (alamiah), kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural.

Kategori kemiskinan tersebut diuraikan oleh Irdam Ahmad dan Ilyas Saad¹⁶ sebagai berikut :

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang dikatakan miskin secara absolut jika penghasilannya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik berupa makanan maupun non makanan.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif menunjukkan tingkat ketimpangan dalam distribusi atau pembagian pendapatan diantara berbagai golongan penduduk, daerah, maupun antar sektor kegiatan ekonomi.

Dan dari aspek penyebabnya, kemiskinan dapat diuraikan menjadi:

1. Kemiskinan natural

Kemiskinan natural pada umumnya selalu ada dalam setiap negara yang sedang membangun dan berkembang.

¹⁵ Irdam Ahmad dan Ilyas Saad, *Kajian Implementasi Kebijakan Trilogi Pembangunan* (Jakarta: STEKPI, 2006), p. 168.

¹⁶ Lincolin Arsyad, *op.cit.*, p. 169.

2. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang karena gaya hidup, kebiasaan dan budayanya mereka merasa sudah berkecukupan dan tidak merasa kekurangan.

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural diartikan sebagai penduduk miskin yang selain tidak bisa mencukupi pangan dan sandang juga karena tidak sanggup mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai serta terkucil dalam pergaulan sosial di lingkungannya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria kemiskinan meliputi rendahnya penghasilan yang menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di berbagai wilayah, adanya budaya kemiskinan dalam sikap seseorang dan merasa terkucil dalam lingkungan sosialnya.

Di sisi lain, Fernandez dalam Lincolin Arsyad¹⁷ menambahkan tentang beberapa ciri masyarakat miskin ditinjau dari berbagai aspek, antara lain:

1. Aspek politik: tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.
2. Aspek sosial: tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada.
3. Aspek ekonomi : rendahnya kualitas SDM, termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan, dan rendahnya kepemilikan atas aset fisik, termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.
4. Aspek budaya atau nilai : terperangkap budaya rendahnya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan mudah menyerah.

¹⁷ *Ibid.*, p. 300.

Sementara itu, Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia dan Badan Penelitian SMERU dalam buku Hari Susanto¹⁸ menggambarkan masalah kemiskinan sebagai masalah yang banyak mengandung dimensi. Secara sederhana kita bisa mengelompokkannya sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, seperti pangan, sandang dan papan;
- b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya. Sebut saja seperti masalah kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi;
- c. Tidak adanya jaminan masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga;
- d. Kerentanan terhadap berbagai guncangan, baik yang bersifat individual maupun massal;
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam;
- f. Tidak dilibatkannya kegiatan sosial masyarakat;
- g. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
- h. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial, seperti adanya anak-anak yang terlanta, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa masalah kemiskinan sangat namun memiliki latar belakang yang rumit kompleks dan multidimensional. Kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan tidak muncul seketika, namun memiliki latar belakang yang rumit sehingga sulit untuk mengetahui akar dari masalah kemiskinan itu sendiri.

Sedangkan kemiskinan bersifat multidimensional artinya melihat dari banyaknya kebutuhan manusia, maka kemiskinan pun memiliki aspek primer berupa kemiskinan akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan, serta aset sekunder berupa kemiskinan akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi.

¹⁸ Hari Susanto, *op.cit.*, p .35.

b. Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Timbulnya kemiskinan di suatu negara karena berbagai faktor penyebab yang mengakibatkan masyarakat di negara tersebut berada pada garis kemiskinan.

Soedjono dalam Muslim Kasim¹⁹ mengungkapkan kemiskinan dapat terjadi akibat sistem ekonomi yang berlaku karena yang kuat menindas yang lemah, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai bagi golongan yang bersangkutan, struktur pemilikan dan penggunaan tanah, pola usaha yang terbelakang dan pendidikan angkatan kerja yang rendah.

Kuncoro dalam Rudy Badrudin juga mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan adalah:

1. Secara mikro, kemiskinan karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah;
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah, berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan; dan
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan.

¹⁹ Muslim Kasim, *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia & Strategi penanggulangannya, Studi Kasus: Padang Pariaman* (Jakarta: PT Indomedia Global, 2006), p. 87.

Pendapat Bradshaw²⁰ yang diungkapkan dalam Antonio Pradjasto hardoyo menguraikan ada lima penjelasan mengapa terjadi kemiskinan, diantaranya adalah:

1. Kelemahan-kelemahan individual (*Individual Deficiencies*)
2. Sistem budaya yang mendukung subkultur kemiskinan
3. Distorsi-distorsi ekonomi politik atau diskriminasi sosial-ekonomi
4. Kesenjangan kewilayahan
5. Asal-usul lingkungan yang bersifat kumulatif.

Oscar Lewis dalam Hari Susanto²¹, dengan salah satu kajiannya yang terkenal mengenai “budaya kemiskinan” (*Culture of Poverty*) terhadap 5 keluarga di Meksiko mengungkapkan dua hal yang dianggap sebagai penyebab terjadinya kemiskinan. Dua hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang tidak mampu memanfaatkan potensi diri, menyiak-nyiakan sumber daya yang ada, menjauhkan diri dari kegiatan organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian golongan pertama ini dapat dikategorikan sebagai mereka yang mengecilkan kapasitas pribadi akibatnya mereka menjadi miskin.
2. Budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan dianggap sebagai suatu cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui garis keturunan keluarga.

Secara sederhana, penyebab kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam dua golongan besar yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh perilaku dan sifat orang miskin karena mereka mempunyai budaya kemiskinan, dan yang kedua adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar dirinya seperti kebijakan, struktur, dan juga sistem sosial ekonomi.

c. Ukuran Kemiskinan

²⁰ Antonio Pradjasto hardoyo, dkk, *Mendahulukan Si Miskin, Buku Sumber Bagi Anggaran Pro Rakyat* (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2008), p. 14.

²¹ Hari Susanto, *op.cit*, p. 51.

Pada dekade 1970-an, pada saat minat dan perhatian bagi masalah kemiskinan tengah meningkat, para ahli ekonomi pembangunan mulai berusaha mengukur luasnya atau kadar parahnya tingkat kemiskinan di dalam suatu negara dan kemiskinan relatif antarnegara dengan cara menentukan atau menciptakan suatu batasan yang lazim disebut sebagai garis kemiskinan (*poverty line*).

Mankiw²² dalam bukunya menyatakan tingkat kemiskinan (*poverty rate*) sebagai “persentase populasi keluarga yang pendapatannya dibawah suatu tingkat atau angka yang disebut batas kemiskinan atau garis kemiskinan (*poverty line*)”.

Tulus T.H Tambunan²³ mengungkapkan bahwa:

Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Sedangkan kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.

Kemudian Badan Pusat Statistik²⁴ mendefinisikan bahwa:

Garis kemiskinan ini tidak mengenal batas negara, tidak terpengaruh oleh tingkat pendapatan per kapita nasional, dan memperhitungkan tingkat harga yang berbeda-beda dengan cara mengukur kemiskinan sebagai setiap orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari \$1,25 per hari atau \$2 per hari dalam perhitungan dolar PPP.

²² N Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2003), p. 574.

²³ Tulus T.H Tambunan. *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), p. 84.

²⁴ Michael P. Todaro, *op.cit.*, p. 262.

Namun garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda, tidak semua negara di dunia mengikuti standar minimum yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Di Indonesia, yang menjadi acuan untuk menentukan garis kemiskinan adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut BPS²⁵, Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Menurut BPS, untuk menentukan garis kemiskinan terlebih dahulu dengan menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan sementara. Garis Kemiskinan sementara adalah garis kemiskinan periode lalu yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK), kemudian dihitung GKM dan GKNM.

²⁵ Badan Pusat Statistik, *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*, 2011, p. 31

Adapun rumus perhitungannya menurut BPS²⁶ dalam Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia adalah :

$$GKM_{jp} = \prod_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \prod_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Keterangan :

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p .

P_{jkp} = Rata-rata Komoditi k di daerah j dan provinsi p .

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p .

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p .

j = Daerah (perkotaan atau perdesaan)

p = Provinsi ke- p

Langkah berikutnya GKM tersebut disetarakan dengan mengalikan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$HK_{jp} = \frac{\prod_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\prod_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Keterangan :

$\frac{K_{jkp}}{HK_{jp}}$ = Kalori k di daerah j provinsi p

= Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p

²⁶ *Ibid.*, p.33.

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

Keterangan :

GKM_{jp} = Kebutuhan minimum makan di daerah j , yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori /kapita/hari

j = Daerah (perkotaan / perdesaan)

p = Provinsi p

52

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1} r_{kj} V_{kjp}$$

Keterangan :

$GKNM_{jp}$ = pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p .

V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi / sub kelompok non makanan daerah j dan provinsi p

r_{kjp} = Rasio pengeluaran komoditi/sub kelompok non makanan k menurut daerah

k = Jenis komoditi non makanan terpilih

j = Daerah (perkotaan/perdesaan)

p = Provinsi (perkotaan/perdesaan)

Dari beberapa teori tentang kemiskinan di atas, dapat disimpulkan bahwa keemiskinan merupakan keadaan dimana tingkat pendapatan penduduk berada di bawah garis kemiskinan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Yang dapat disebabkan oleh perilaku dan sifat orang miskin yang berasal dari dirinya sendiri maupun kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar dirinya.

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi, karena setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Nurani Soyomukti²⁷ mengemukakan bahwa pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Kemudian pendapat Redja Mudyahardjo yang dikutip oleh Rulam Ahmadi²⁸, menyatakan bahwa pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.

Hal ini serupa dengan pendapat Edgar Dalle dalam Dedy Mulyasana²⁹, yang menyatakan bahwa:

pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan perananan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.

Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup sebagai pemberdayaan diri untuk mempersiapkan manusia memainkan perannya dalam kehidupan.

Pendapat W.J.S Poerwadarminta yang dikutip oleh Hamdani³⁰, mengungkapkan bahwa pendidikan artinya memelihara dan melatih manusia. Pendidikan merupakan usaha dan proses mengubah sikap dan tingkah laku

²⁷ Nurani Sotomukti, *Teori-Teori Pendidikan* (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2010), p. 27.

²⁸ Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan* (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2014), p.36.

²⁹ Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing* (Bandung: Bumi Aksara, 2011), p.4

³⁰ Hamdani, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), p. 18.

manusia serta mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Dari definisi tersebut, berarti melalui pendidikan dan pengajaran sikap dan tingkah laku manusia dapat dirubah kearah yang lebih baik.

Sihombing dan Indardjo³¹ menyatakan bahwa pendidikan diartikan sebagai barang publik yang berarti bahwa pendidikan secara keseluruhan bukan merupakan kebutuhan perorangan atau individu saja, melainkan merupakan kebutuhan bersama dari seluruh komponen yang ada dalam suatu Negara.

Pendapat senada juga disampaikan La Belle yang dikutip oleh Rulam Ahmadi³² bahwa:

pendidikan dipandang sebagai difusi sikap, informasi, dan keterampilan belajar yang diperoleh dari partisipasi sederhana dalam program- program yang berbasis masyarakat, merupakan sebuah komponen fundamental dalam usaha-usaha perubahan sosial mikro.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan individu melalui lembaga pendidikan guna mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan mendatang.

Rulam Ahmadi³³ mengutip pendapat dari Danim bahwa secara tradisional tujuan utama pendidikan adalah transmisi pengetahuan atau proses membangun manusia menjadi berpendidikan. Sedangkan menurut HaveLock dan Huberman dalam Rulam Ahmadi³⁴, pendidikan bertujuan untuk pembangunan negara secara keseluruhan melalui penyediaan tenaga kerja yang terampil untuk peranan-

³¹ H.M.Zainuddin, *Reformasi Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), p.74

³² Rulam Ahmadi, *loc.cit.*, p.34.

³³ *Ibid.*,p.45.

³⁴ *Ibid.*, p. 43

peranan yang beragam dan melalui pengajaran pada generasi baru mengenai tujuan-tujuan masyarakat secara menyeluruh dan alat-alat pemenuhan mereka.

Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pengajaran keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk masa depan yang berkelanjutan.

Terkait dengan fungsi pendidikan, masih dengan pendapat HaveLock dan Huberman yang dikutip oleh Rulam Ahmadi³⁵ bahwa pendidikan memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah:

1. Untuk menciptakan pemahaman identitas nasional melalui pengajaran sejarah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi.
2. Untuk memberikan bahasa percakapan dan tulis secara umum yang mungkin tidak ada orang yang mengadakan sebelumnya.
3. Untuk menanamkan seperangkat nilai-nilai sosial dan politik.
4. Untuk memberikan seperangkat keterampilan spesifik yang akan memungkinkan ekonomi yang seimbang dan terpadu menjadi kenyataan.

Fuad Ihsan³⁶ mengemukakan bahwa jenis lembaga pendidikan sekolah terdiri dari:

1. Pendidikan sekolah
2. Pendidikan luar sekolah

Sedangkan jenjang pendidikan terdiri dari :

1. Pendidikan Dasar
2. Pendidikan Menengah
3. Pendidikan Tinggi

Indikator pendidikan paling dasar yang sering digunakan oleh Badan Pusat Statistik adalah tingkat kemampuan baca tulis dan rata-rata lamanya sekolah.

³⁵ Rulam Ahmadi, *op.cit.*, p. 47

³⁶ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), p. 22-23.

Lamanya sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori tingkat pendidikan terakhir menjadi bentuk numerik.

BPS mendefinisikan rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh jenis pendidikan formal yang pernah dijalani (tidak termasuk tahun yang mengulang). Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap satu tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Untuk memperoleh angka rata-rata lama sekolah dihitung dengan mengolah dua variabel secara simultan yaitu: tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan (angka perolehan dari susenas). Perhitungan rata-rata lama sekolah untuk masing-masing individu. Tahap selanjutnya dihitung rata-rata lama sekolah.

$$MYS = \frac{\sum f_i X_{ji}}{\sum}$$

MYS : rata-rata lama sekolah

f : frekuensi penduduk berumur 15 tahun ke atas

ji : lama sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan yang ditamatkan
atau yang pernah diikuti

i : jenjang pendidikan

Tabel II.1

**Jenjang Pendidikan dan Lama Sekolah yang digunakan untuk Menghitung
Rata-rata Lama Sekolah**

Jenjang Pendidikan	Lama Sekolah (Tahun)
Tidak / Belum pernah sekolah	0
Belum / Tidak tamat SD	1-5
Tamat SD	6
Belum / Tidak tamat SLTP	7-8
Tamat SLTP	9
Belum / Tidak tamat SLTA	10-11
Tamat SLTA	12
Belum / Tidak tamat D3	13-14
Tamat D3	15
Belum / Tidak tamat S1	13-16
Tamat S1	17

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari penjelasan diatas, maka tingkat pendidikan adalah lamanya pendidikan formal yang ditempuh masyarakat yang diukur dengan rata-rata lama sekolah yang diambil dari Badan Pusat Statistik.

3. Upah Minimum

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang menawarkan jasa dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan proses produksi. Untuk itu, tenaga kerja berhak mendapatkan balas jasa dari perusahaan tempat ia bekerja berupa penghasilan dalam bentuk upah sebagai balasan atas pengorbanannya. Upah merupakan salah satu komponen penting dalam duna ketenagakerjaan kerana bersentuhan langsung dengan kesejahteraan pekerja.

a. Pengertian Upah

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003³⁷ tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 30 menyebutkan bahwa Upah adalah:

hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sonny Sumarsono³⁸ menyatakan bahwa :

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan atau dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan termasuk dengan tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun dengan keluarganya.

Definisi upah menurut Badan Pusat statistik³⁹ adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk jasa yang telah atau akan dilakukan, dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh.

Berdasarkan beberapa definisi upah tersebut dapat disimpulkan bahwa upah adalah bentuk balas jasa atas usaha yang diberikan pengusaha kepada karyawan atau pegawainya sesuai dengan persetujuan antara pihak perusahaan dan karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

³⁷ UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, p.3

³⁸ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia (Jakarta: Graha Ilmu, 2009)*, p.149

³⁹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Upah 2010* (Jakarta : BPS, 2010), p.10

T Gilarso⁴⁰ mengungkapkan bahwa upah atau balas karya tenaga kerja ada dua dua segi yang penting : untuk pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang mesti ditekan serendah mungkin. Tetapi untuk karyawan upah merupakan sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya, dan dengan demikina juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat.

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan kepada dua pengertian, yaitu gaji dan upah. Sadono Sukirno⁴¹ megungkapkan bahwa gaji diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan biasanya satu bulan sekali kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja professional, seperti: pemerintah, dosen, guru, manajer, dan akuntan. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannnya selalu berpindah-pindah, seperti pekerja kasar yang pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar.

Pengertian upah menurut Badan Pusat Statistik⁴² terbagi menjadi Upah Nominal dan Upah Riil. Upah nominal merupakan rata-rata upah per bulan yng diterima buruh produksi atau pelaksana dibawah pengawas atau mandor atau supervisor dalam bentuk uang. Sedangkan upah riil adalah besarnya upah nominal dibagi dengan IHK. Upah riil menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima buruh.

Edytus Adisu⁴³ menjelaskan terkait macam-macam upah, antara lain :

⁴⁰ T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), p.211.

⁴¹ Sadono, Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: rajawali Pers, 2009), p.350

⁴² Badan P:usat Statistik, *Op.Cit.*, .10-11

⁴³ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung : Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat* (Jakarta: Forum Sahabat,2008), p.3-4.

1. Upah harian

Upah harian adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan yang dihitung secara seharian atau berdasarkan tingkat kehadiran.

2. Upah borongan

Upah borongan adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan secara borongan atau berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja atau pekerjaan yang bergantung pada cuaca atau pekerjaan yang bersifat musiman.

3. Upah tetap

Upah tetap adalah upah yang diterima buruh/pekerja secara tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap.

4. Upah tidak tetap

Upah tidak tetap adalah upah yang diterima buruh/pekerja secara tidak tetap atas suatu pekerjaan. Tidak tetapnya upah yang diterima pekerja disebabkan oleh volume pekerjaan yang tidak stabil.

b. Upah minimum

Gouzali Saydam⁴⁴ menyatakan bahwa upah minimum adalah besarnya upah terendah dari perusahaan yang diberikan kepada pekerja. Upah tersebut diberikan berdasarkan peraturan yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut dan disepakati bersama oleh pekerja dengan perusahaan.

⁴⁴ Gouzali Saydam, *Manajemen Sumber Daya Manusia- Suatu pendekatan Mikro* (Jakarta: Djambatan, 2005) p.150.

Pendapat tentang upah minimum juga disampaikan oleh Sonny Sumarsono⁴⁵ bahwa upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral.

Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa upah minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja berdasarkan wilayah bekerja masing-masing dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.

Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja.

Pendapat Payaman yang diungkapkan oleh Sonny Sumarsono⁴⁶ bahwa pemerintah menetapkan upah minimum agar upah yang diterima karyawan setidaknya memenuhi kebutuhan hidup minimum karyawan dan keluarganya. Kebijakan penentuan upah minimum yaitu :

⁴⁵ *Ibid.*, p.151

⁴⁶ *Ibid.*, p.152

1. Menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah daripada suatu tingkat tertentu
2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan
3. Mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien.

Edytus Adisu⁴⁷ mengungkapkan bahwa bentuk perlindungan pemerintah mengenai upah itu antara lain berupa :

1. Penetapan upah minimum
2. Upah kerja lembur
3. Upah tidak masuk kerjak karena berhalangan
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
5. Upah menjalankan waktu istirahat kerjanya
6. Bentuk dan cara pembayaran upah
7. Denda dan pemotongan upah
8. Hal-hal yang dapat dipergitungkan oleh upah
9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
10. Upah untuk pembayaran pesangon, dan
11. Upah untuk penghitungan pajak penghasilan.

Libertus Jehani⁴⁸ mengungkapkan bahwa penetapan upah minimum bergantung pada situasi dan kondisi perekonomian nasional, juga dikaitkan dengan keadaan perekonomian di setiap daerah / wilayah provinsi / kabupaten / kota. Aspek-aspek yang menjadi acuan dalam penetapan upah minimum tersebut antara lain:

1. Kebutuhan hidup minimum(KHM)
2. Indeks harga konsumen (IHK)
3. Kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan

⁴⁷ Edytus Adisu, *Loc.Cit*

⁴⁸ Libertus Jehani, *Hak Hak Karyawan Kontrak* (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), p.16

4. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah
5. Kondisi pasar kerja dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.

4. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan per Kapita, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta

Penelitian lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Darma Rika S, Munawaroh, dan Dita Puruwita⁴⁹ dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan per Kapita, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif kualitatif terhadap data *time series* dan analisis kuantitatif yang menggunakan alat *software* SPSS.

Dari uji F-Statistik yang signifikan sampai dengan tingkat kepercayaan 0,00000 dan nilai Adj.R2 yang sebesar 91,9 % dapat dinyatakan bahwa persamaan model yang terbentuk cukup baik dan menghasilkan tanda +/- sebagaimana yang diharapkan, yakni kenaikan tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita akan

⁴⁹ Darma Rika S, Munawaroh, dan Dita Puruwita, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan per Kapita, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta", ECONOSAINS, Vol X No 2, Agustus 2012.

berakibat kemiskinan menurun. Adapun kenaikan pengangguran yang bertanda positif akan mengakibatkan kemiskinan menguat.

2. Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan TPAK Wanita terhadap Kemiskinan di Kabupaten Gresik (Studi Kasus Tahun 2008-2012)

Penelitian yang ditulis oleh Radhitya Widyasworo bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik tahun 2008-2012.⁵⁰ Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan data time series. Setelah dilakukan uji asumsi klasik, dilanjutkan dengan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat kemiskinan dan untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh paling besar terhadap tingkat kemiskinan. Pendidikan, Kesehatan dan TPAK Wanita terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik tahun 2008-2012.

Dalam rentang waktu antara 2008-2012, secara simultan semua variabel independen, yaitu Tingkat Pendidikan (X1), Tingkat Kesehatan (X2) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita (X3), di Kabupaten Gresik pada khususnya mempunyai pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Peningkatan dan perbaikan pada ketiga variabel bebas tersebut, mampu mengurangi Tingkat Kemiskinan yang ada secara signifikan. Hal ini didukung oleh hasil regresi, dimana diperoleh hasil uji F sebesar 5,962 dengan sig.F sebesar 0,027.

Variabel yang berpengaruh dominan dalam mengatasi tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita, sehingga

⁵⁰Radhitya Widyasworo, "Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Angkatan Kerja Wanita terhadap Kemiskinan di Kabupaten Gresik (Studi Kasus Tahun 2008-2012)."

perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat agar bisa diarahkan dan didukung secara optimal.

3. Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan, dan Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali

Penelitian yang dibuat oleh Putu Seruni Pratiwi Sudiharta dan Ketut Sutrisna⁵¹ ini bertujuan untuk mencari tahu hubungan PDRB per kapita, pendidikan yang diprosikan dengan angka rata-rata lama sekolah (MYS), dan produktivitas tenaga kerja terhadap kemiskinan dengan menggunakan uji regresi linier berganda dan untuk melengkapinya juga dilakukan uji Vector Autoregression (VAR).

Berdasarkan hasil olah data, diketahui bahwa variabel PDRB per kapita tidak dapat dimasukkan ke dalam model karena mengandung multikolinearitas tertinggi, sehingga harus dikeluarkan dari model. Namun berdasarkan hasil uji kausalitas granger pada analisis VAR menyatakan bahwa variabel PDRB per kapita mempengaruhi kemiskinan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 1996 - 2012, sedangkan produktivitas tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan.

4. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013)

⁵¹ Putu Seruni Pratiwi Sudiharta dan Ketut Sutrisna, "Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan, dan Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali" E-Jurnal EP Unud, 3 [10] : 431-439, ISSN: 2303-0178.

Penelitian yang ditulis oleh Lailatul Istifaiyah⁵² ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang mencakup tujuh Kota/Kabupaten di Gerbangkertasusila selama kurun waktu lima tahun dengan bantuan software E-views 7. Data yang diperoleh berasal dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila adalah pertumbuhan ekonomi dan upah minimum. Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila.

B. Kerangka Teoretik

1. Tingkat pendidikan dan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Paulo Freire dalam Haryono Suyono⁵³ mengungkapkan bahwa terkait dengan kemiskinan, pendidikan berfungsi “sebagai instrumen pembebas, yakni membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan penindasan. Dengan kata lain pendidikan dapat meningkatkan mutu kehidupan sehingga terbebas dari kemiskinan.

⁵² Lailatul Istifaiyah, *”Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013)”*

⁵³ Haryono Suyono, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005), p.121

Todaro⁵⁴ mengungkapkan bahwa pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Kemudian Todaro⁵⁵ juga menambahkan bahwa negara-negara yang lebih kaya dapat berinvestasi lebih banyak dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang berarti tambahan modal manusia ini mempertinggi produktivitas. Produktivitas masyarakat akan mempengaruhi tingkat pendapatan manusia, semakin tinggi pendapatan manusia maka semakin besar peluang masyarakat keluar dari kemiskinan. Senada dengan pendapat lain Todaro yakni tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan.

Simommons dalam Karl E dan Ray C⁵⁶ juga mengungkapkan bahwa “pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan”. Dimana seseorang yang ingin mengharapkan pekerjaan baik dan berpenghasilan tinggi maka orang tersebut harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi.

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh Mohammad Ali⁵⁷ bahwa “pendidikan berperan penting tidak hanya untuk meraih keberhasilan

⁵⁴ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ke Tujuh. Jakarta: Erlangga. 2000). p.446.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 61

⁵⁶ Karl edan Ray C.Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi, suntingan Y. Andi Zaimur* (Jakarta: Erlangga, 2007), p.36

⁵⁷ Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2009), p.108.

pembangunan yang menghargai lingkungan tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan.”

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas dapat di duga terdapat pengaruh negatif tingkat pendidikan terhadap kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka tingkat kemiskinan pun akan semakin berkurang.

2. Upah Minimum dan Kemiskinan

Upah minimum ditetapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan standar hidup minimum pekerja. Menurut M. Dawam Rahardjo⁵⁸, beberapa faktor penyebab kemiskinan antara lain: (1) kesempatan kerja, dimana seseorang itu miskin karena menganggur, sehingga tidak memperoleh penghasilan atau kalau bekerja tidak penuh, baik dalam ukuran hari, minggu, bulan, maupun tahun, (2) upah gaji dibawah minimum, (3) produktivitas kerja yang rendah, (4) ketiadaan aset, (5) diskriminasi, (6) tekanan harga, dan (7) penjualan tanah.

Kaufman dan Bruce⁵⁹ mengungkapkan bahwa “semakin tinggi tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terbebas dari kemiskinan”.

Gregory Mankiw⁶⁰ juga mengungkapkan bahwa “upah minimum yang lebih tinggi dipandang sebagai sarana meningkatkan pendapatan para pekerja miskin.”

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas dapat di duga terdapat pengaruh negatif upah minimum terhadap kemiskinan. Semakin tinggi

⁵⁸ Dawam Rahardjo, *Menuju Indonesia Sejahtera*, (Jakarta: Khanata, Pustaka LP#ES, 2006), p.50.

⁵⁹ Kaufaman, Bruce, *The Economics of Labor Markets, Fifth Edition*, (The Dryden Press, New York. 2000) ,p.87.

⁶⁰ N Gregory Mankiw, *MakroEkonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2006), p.162.

upah minimum yang diberlakukan maka akan mengurangi kemiskinan suatu masyarakat.

3. Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Kemiskinan

Hadiwigeno dan Pakpahan dalam Muslim Kasim⁶¹ mengemukakan bahwa penyebab kemiskinan antara lain, yaitu:

1. Sumber Daya Alam (SDA)
 - a. Lahan kurang subur
 - b. Pendayagunaan lahan kurang
 - c. Degradasi lahan
2. Teknologi dan Unsur Pendukungnya
 - a. Aplikasi teknologi rendah
 - b. Ketersediaan sarana produksi terbatas
 - c. Hama penyakit
3. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Tingkat pendidikan rendah
 - b. Produktivitas tenaga kerja rendah
 - c. Tingkat kesehatan masyarakat rendah
 - d. Tradisi yang menghambat
4. Lapangan kerja terbatas Sarana, Prasarana dan Kelembagaan
 - a. Daerah terisolir
 - b. Modal terbatas
 - c. Irigasi terbatas
 - d. Pemilikan lahan sempit
 - e. Bagi hasil yang tidak adil
 - f. Tingkat upah yang rendah.

Tulus T.H Tambunan⁶² mengungkapkan banyak faktor-faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah atau negara seperti derajat pendidikan, tenaga kerja, dan struktur ekonomi.

⁶¹ Muslim Kasim, *op.cit*, pp. 86-87.

⁶² Tulus T.H.Tambunan, *Perekonomian Indonesia, Kajian Teoretis dan Analisis Empiris* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), p.185

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas dapat diduga terdapat pengaruh negatif yakni tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan.

C. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teori di atas, maka dapat diajukan perumusan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh negatif antara tingkat pendidikan dengan kemiskinan, semakin tinggi tingkat pendidikan akan mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan.
2. Terdapat pengaruh negatif antara upah minimum dengan kemiskinan, semakin tinggi upah minimum suatu provinsi akan mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan.
3. Terdapat pengaruh negatif antara tingkat pendidikan dan upah minimum dengan kemiskinan, semakin tinggi tingkat pendidikan dan upah minimum akan mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat (sahih, benar, valid) dan dapat dipercaya (dapat diandalkan, reliabel) tentang pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum kemiskinan di Pulau Jawa.

B. Obyek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek dan ruang lingkup penelitian ini adalah tingkat pendidikan, upah minimum, dan kemiskinan di pulau Jawa dengan menggunakan data-data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari – Juni 2015 karena merupakan waktu yang efektif bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian sehingga peneliti dapat fokus pada saat penelitian dan keterbatasan peneliti dalam waktu, tenaga, dan materi. Ruang lingkup penelitian ini adalah mengkaji pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, dan kemiskinan di pulau Jawa dari tahun 2006 sampai 2014.

C. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Ex Post Facto*. *Ex post Facto* adalah meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menuntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang

menimbulkan kejadian tersebut. Cara menerapkan metode penelitian ini yaitu dengan menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi dari tahun ke tahun sebelumnya untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut.

Metode *ex post facto* bermanfaat untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih dan mengukur seberapa besar atau seberapa erat hubungan antar variabel yang diteliti. Metode ini dipilih karena sesuai dengan judul dan tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan tepat mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan di pulau Jawa 2006 sampai 2014.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data yang telah tersedia dalam bentuk angka. Data sekunder tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik, diantaranya adalah:

1. Data pertahun jumlah penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
2. Data pertahun rata-rata lama sekolah menurut provinsi di Pulau Jawa yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
3. Data per tahun upah minimum provinsi di pulau Jawa yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel penelitian ini diperlukan untuk memenuhi jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu, proses ini dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara luas.

1. Kemiskinan

a. Definisi Konseptual

Kemiskinan merupakan keadaan dimana tingkat pendapatan penduduk berada di bawah garis kemiskinan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari.

b. Definisi Operasional

Kemiskinan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan data jumlah penduduk miskin yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan bentuk angka secara berkala. Standar kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah menurut Garis Kemiskinan di setiap wilayah. Data ini didapat oleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data yang digunakan berdasarkan data masing-masing provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2006-2014.

2. Tingkat Pendidikan

a. Definisi Konseptual

Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh atau yang ditamatkan seseorang atau masyarakat dalam suatu wilayah.

b. Definisi Operasional

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan data rata-rata lama sekolah yang diperoleh dari BPS dengan bentuk angka secara berkala menurut provinsi di pulau Jawa. Data rata-rata lama sekolah yang digunakan berdasarkan data masing-masing provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2006-2014.

3. Upah Minimum**a. Definisi Konseptual**

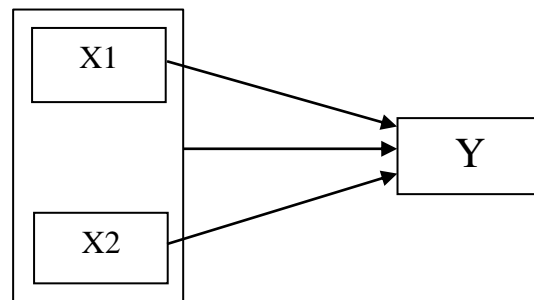
Upah minimum merupakan upah bulanan yang diterima pekerja sebagai balas jasa atas usahanya yang diberikan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum karyawannya berdasarkan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.

b. Definisi Operasional

Upah minimum adalah upah minimum yang diukur dari kebutuhan fisik minimum atau kebutuhan hidup layak setiap daerah dengan memperhatikan saran dari Departemen Tenaga Kerja dan Dewan penelitian pengupahan di daerah. Data yang digunakan adalah data upah minimum provinsi yang dipublikasikan oleh BPS.

F. Konstelasi Hubungan Antar Variabel

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yang menjadi objek penelitian dimana kemiskinan merupakan variabel terikat (Y). Sedangkan variabel bebas adalah tingkat pendidikan (X1), upah minimum (X2). Konstelasi pengaruh antar variabel di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

X_1 = Tingkat Pendidikan
 X_2 = Upah Minimum
 Y = Kemiskinan
 \rightarrow = Arah Pengaruh

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data panel. Data panel adalah data yang berstruktururut waktu sekaligus *cross section*.⁶³ Dengan kata lain, data panel merupakan unit-unit individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, model data panel ini memiliki kemampuan di dalam menjelaskan bagaimana suatu individu berperilaku berbeda dibandingkan individu lainnya dan/atau juga sekaligus bisa mengetahui bagaimana perbedaan dari pola perubahan variabel antar waktu.

1. Uji Prasyarat Analisis

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji t dan uji F mengasumsikan nilai

⁶³ Moch. Doddy Ariefianto, *Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews* (Jakarta: Erlangga, 2010), p.148.

residual mengikuti distribusi normal. Sehingga jika asumsi ini tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik *Jarque-Bera*⁶⁴.

Peneliti memilih uji *Jarque-Bera* menggunakan program *Eviews* 8.0 dalam penelitian ini. Nilai *Jarque-Bera* yang diperoleh melalui program *Eviews* ini selanjutnya dapat kita hitung signifikansinya untuk menguji hipotesis berikut :

H_0 = Residual terdistribusi normal

H_1 = Residual tidak terdistribusi normal

H_0 diterima apabila nilai probabilitas *Jarque-Bera* $> 0,05$ yang artinya data berdistribusi normal. Sebaliknya apabila nilai probabilitas *Jarque-Bera* $> 0,05$, maka H_1 diterima atau H_0 ditolak. Normalitas residual juga dapat dilakukan dengan melihat nilai *Jarque-Bera* lalu dibandingkan dengan tabel *chi-square* dimana H_0 diterima apabila nilai *Jarque Bera* $<$ tabel *chi square* dengan df 2 pada taraf signifikansi 0,05.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah ada kesamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah bila tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas, dimana semua residual atau error mempunyai varian yang sama. Jika varian tidak konstan atau berubah-ubah, maka model mengalami heteroskedastisitas.

⁶⁴Imam Ghozali dan Dwi Ratmono, *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 8* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2013), p.165

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam suatu model dapat dilakukan melalui Uji *white*. Data dikatakan terdapat heteroskedastisitas apabila nilai p -value Prob Chi Square $< 0,05$, dan sebaliknya, data dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas saat nilai p -value Prob Chi Square $> 0,05$ ⁶⁵.

2. Analisis Regresi Data Panel

Regresi adalah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui⁶⁶.

Untuk mengetahui pengaruh secara kuantitatif dari tiga variabel yakni tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan dengan persamaan:

$$\text{LnKMS} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnTP} + \beta_2 \text{LnUPAH} + e$$

Keterangan:

KMS = Kemiskinan

TP = Tingkat Pendidikan

UMP = Upah Minimum

β_0 = *intercept*

$\beta_1\beta_2$ = Koefisien Regresi Parsial untuk TP dan Upah Minimum

e = *Error/disturbance* (variabel pengganggu)

Ln = Logaritma Natural

⁶⁵ Sofyan Yamin, dkk., *op.cit.*, p.40

⁶⁶ Agus Widarjono, *Ekonometrika* (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2013), p.7

Data panel merupakan unit-unit individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu ($t= 1,2,\dots,T$) dan N jumlah individu ($i= 1,2,\dots,N$), maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak NT . Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut *balanced panel*. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut *unbalanced panel*. Penggunaan data panel pada dasarnya merupakan solusi akan ketidakterediaan data *time series* yang cukup panjang untuk kepentingan analisis ekonometrika.

Kelebihan penggunaan data panel antara lain :

1. Dapat mengendalikan heterogenitas individu atau unit *cross section*.
2. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, mengurangi kolinearitas di antara variabel, memperbesar derajat bebas, dan lebih efisien.
3. Panel data lebih baik untuk studi *dynamic of adjustment*.
4. Dapat lebih baik untuk mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak dapat dideteksi dalam model data *cross section* maupun *time series*.
5. Lebih sesuai untuk mempelajari dan menguji model perilaku (*behavioral models*) yang kompleks dibandingkan dengan model data *cross section* atau *time series*.⁶⁷

Terdapat tiga metode pada estimasi model menggunakan data panel, yaitu model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*.

⁶⁷Arief Daryanto dan Yundy Hafizrianda, *Model-Model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Konsep dan Aplikasi* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2010), p.85-86.

a. Model *Common Effect*

Model *common effect* merupakan model regresi data panel yang paling sederhana. Model ini pada dasarnya mengabaikan struktur panel dari data, sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu atau dengan kata lain pengaruh spesifik dari masing-masing individu diabaikan atau dianggap tidak ada. Dengan demikian, akan dihasilkan sebuah persamaan regresi yang sama untuk setiap unit *cross section*.

Berdasarkan asumsi struktur matriks varians-kovarians residual, maka pada model *common effect* terdapat empat model estimasi yang dapat digunakan, yaitu:

- 1) *Ordinary Least Square (OLS)*, jika struktur matrik varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat homoskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*.
- 2) *Generalized Least Square (GLS)/Weighted Least Square (WLS): Cross Sectional Weight*, jika struktur matrik varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*.
- 3) *Feasible Generalized Least Square (FGLS)/ Seemingly Uncorrelated Regression (SUR)* atau *Maximum Likelihood Estimator (MLE)*, jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan ada *cross sectional correlation*.
- 4) *Feasible Generalized Least Square (FGLS)* dengan proses *Auto Regressive (AR)* pada *error term*-nya, jika struktur matriks varians-kovarians

residualnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan ada korelasi antar waktu pada residualnya.

b. Model *Fixed Effect*

Jika model *common effect* cenderung mengabaikan struktur panel dari data dan pengaruh spesifik masing-masing individu, maka model *fixed effect* adalah sebaliknya. Pada model ini, terdapat efek spesifik individu α_i dan diasumsikan berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati X_{it} . Ekananda (2005) menyatakan bahwa berdasarkan asumsi struktur matriks varians-kovarians residual, maka pada model *fixed effect* terdapat tiga metode estimasi yang dapat digunakan, yaitu:

- 1) *Ordinary Least Square* (OLS/LSDV), jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat homoskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*.
- 2) *Weight Least Square* (WLS), jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan tidak ada *cross sectional correlational*.
- 3) *Seemingly Uncorrelated Regression* (SUR), jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan ada *cross sectional correlation*.

c. Model *Random Effect*

Pada model *random effect*, efek spesifik dari masing-masing individu α_i diperlakukan sebagai bagian dari komponen *error* yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati X_{it} .

Asumsi dasar model ini adalah perbedaan nilai intersep antar unit *cross section* dimasukkan ke dalam *error*. Karena hal ini, model *random effect* sering disebut dengan *Error Component Model* (ECM). Model ini diestimasi dengan metode *Generalized Least Square* (GLS). Intersep model ini bervariasi terhadap individu dan waktu, namun slopenya konstan terhadap individu dan waktu. Penggunaan pendekatan *random effect* tidak mengurangi derajat kebebasan sebagaimana terjadi pada model *fixed effect* yang akan berakibat pada parameter hasil estimasi akan menjadi lebih efisien.⁶⁸

2. Uji Model Pendekatan Estimasi Panel

Untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini, maka harus dilakukan beberapa pengujian, antara lain :

a. Uji Chow

Uji *chow* ini digunakan untuk memilih pendekatan model data panel apakah menggunakan *common effect* atau *fixed effect*.

Hipotesis untuk pengujian ini adalah:

H_0 = Model menggunakan *common effect*

H_1 = Model menggunakan *fixed effect*

H_0 diterima apabila nilai probabilitas *Chi-square* > 0.05 (tidaksignifikan). Sebaliknya apabila nilai probabilitas *Chi-square* < 0.05 (signifikan), maka H_1 diterima atau H_0 ditolak.

⁶⁸ Jaka Sriyana, *Metode Regresi Data Panel* (Yogyakarta: Ekonisia), 2014, p.107-112

b. Uji Hausman

Uji *hausman* digunakan untuk memilih pendekatan model data panel apakah menggunakan *fixed effect* atau *random effect*. Hipotesis untuk pengujian ini adalah:

H_0 = Model menggunakan *random effect*

H_1 = Model menggunakan *fixed effect*

H_0 diterima apabila nilai probabilitas *Chi-square* > 0.05 (tidak signifikan). Sebaliknya apabila nilai probabilitas *Chi-square* < 0.05 (signifikan), maka H_1 diterima atau H_0 ditolak.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji seluruh hipotesis yang ada dalam penelitian ini dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$.

a. Uji Keberartian Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebasnya.

Hipotesis pengujian :

$H_0 : \beta_i = 0$

$H_1 : \beta_i \neq 0$

Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji t-student. Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{se(\beta_i)}$$

β_i adalah penduga parameter ke- i , se (β_i) adalah simpangan baku dari nilai penduga parameter ke- i .

Hipotesis nol ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Keputusan ini dapat juga didasarkan pada perbandingan nilai p-value dengan tingkat signifikansinya (α). Hipotesis nol ditolak jika nilai p-value lebih kecil dari (α). Hal ini berarti secara parsial variabel bebas ke- I signifikan memengaruhi variabel tidak bebasnya dengan tingkat kepercayaan sebesar $(1-\alpha) \times 100$ persen.

b. Uji Keberartian Regresi (Uji F)

Untuk menguji keberartian regresi dalam penelitian ini digunakan Uji statistik F dengan tabel ANAVA. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua koefisien variabel independen atau bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen/terikat. Untuk menghitung uji keberartian regresi dapat mencari F_{hitung} dengan rumus dibawah ini :

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah data

Hasilnya dibandingkan dengan tabel F, dengan taraf signifikan (α) adalah 0,05. Hipotesis adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_i = 0$

$H_1 : \beta_i \neq 0$

Kriteria pengujian :

1. Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ yang berarti seluruh variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.
2. Tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang berarti seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

c. Perhitungan Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali, koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Atau dengan kata lain, koefisien determinasi mengukur seberapa baik model yang dibuat mendekati fenomena variabel dependen yang sebenarnya. R^2 (R square) juga mengukur berapa besar variasi variabel dependen mampu dijelaskan variabel-variabel independen ini. rumus menghitungnya adalah dengan terlebih dahulu mencari nilai R atau koefisien korelasi :

$$R_{12}^2 = \frac{\beta_1 \sum X_1 Y + \beta_2 \sum X_2 Y}{\sum Y^2}$$

Maka nilai $R^2 = R_{12}^2$

Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai R^2 mendekati angka satu, berarti variabel independen dalam model semakin mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai R^2 yang mendekati angka nol, berarti variabel independen yang digunakan dalam model semakin tidak menjelaskan variasi variabel dependen.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data yang dipaparkan dalam tiga bagian sesuai dengan variabel dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan dan upah minimum sebagai variabel independen (bebas) dan kemiskinan sebagai variabel dependen (terikat).

1. Kemiskinan

Penelitian ini menggunakan data kemiskinan yang diperoleh dari 6 provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2006 sampai 2014. Data ini berupa data tahunan masing-masing provinsi di Pulau Jawa yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

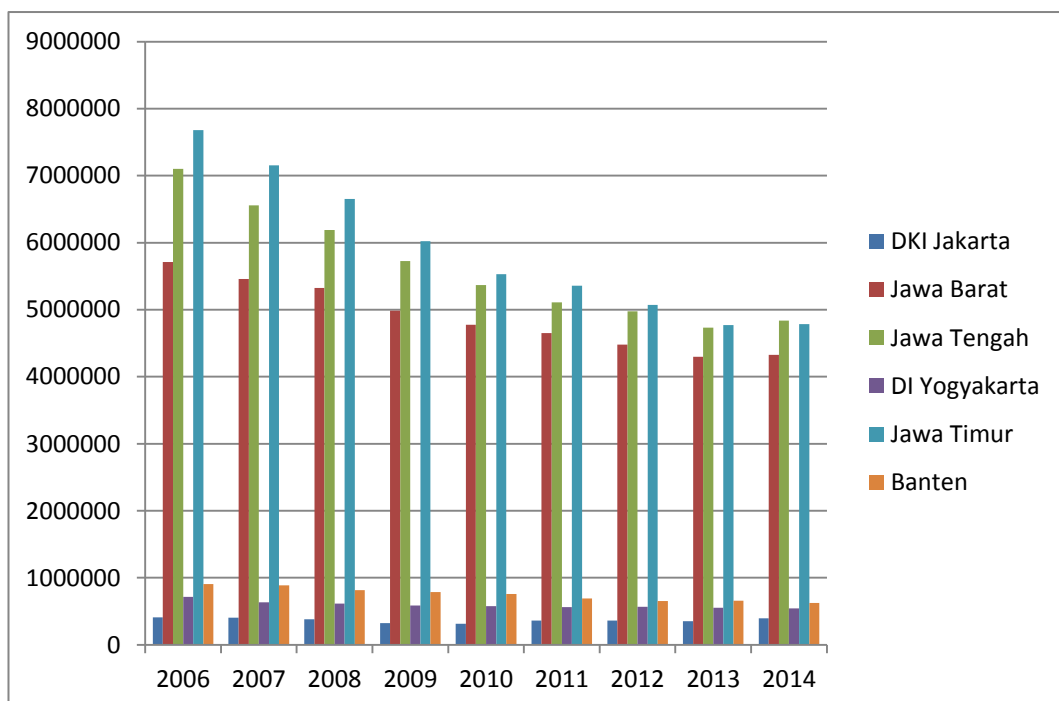
TABEL IV.1
Persentase Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi
di Pulau Jawa Tahun 2006-2014

PROVINSI	TINGKAT KEMISKINAN (dalam jiwa)								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DKI Jakarta	407.100	405.700	379.600	323.200	312.200	363.420	363.200	354.190	393.980
Jawa Barat	5.712.500	5.457.900	5.322.400	4.983.600	4.773.700	4.648.630	4.477.500	4.297.040	4.327.070
Jawa Tengah	7.100.600	6.557.200	6.189.600	5.725.700	5.369.200	5.107.360	4.977.400	4.732.950	4.836.450
DI Yogyakarta	713.990	633.500	616.300	585.800	577.300	560.880	565.300	550.190	544.870
Jawa Timur	7.678.100	7.155.300	6.651.300	6.022.600	5.529.300	5.356.210	5.071.000	4.771.260	4.786.790
Banten	904.300	886.200	816.700	788.100	758.200	690.490	652.800	656.240	622.840

Sumber : BPS

Berdasarkan data yang disajikan menunjukkan bahwa pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat pada provinsi Jawa Timur sebesar 7.678.100. Jumlah penduduk miskin tertinggi kedua terdapat pada provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 7.100.600 jiwa atau dan tertinggi ketiga terdapat pada provinsi Jawa Barat sejumlah 5.712.500 jiwa.

Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin paling rendah terdapat pada provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 393.980 jiwa, penduduk miskin terendah kedua terdapat pada provinsi DIY yaitu sebesar 544.870 jiwa dan penduduk miskin terendah ketiga terdapat pada provinsi Banten yaitu sebesar 622.840 jiwa. Data jumlah penduduk miskin juga dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar IV.1
Jumlah penduduk Miskin di Pulau Jawa berdasarkan Provinsi
Tahun 2006-2014

Gambar IV.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada 6 provinsi di pulau Jawa cenderung mengalami penurunan walaupun pada tahun 2014 cenderung mengalami kenaikan diantaranya : provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin sejumlah 39.790 jiwa. Di Jawa barat kenaikan jumlah penduduk miskin sejumlah 30.030, di Jawa Tengah sebesar 103.500 jiwa dan di Jawa Timur kenaikan penduduk jumlah miskin sejumlah 15.530 jiwa.

Meskipun secara umum tingkat kemiskinan di Pulau Jawa mengalami penurunan, tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tetap dikategorikan belum cukup baik karena penurunannya masih tergolong lambat dan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa tahun 2014 masih terbilang besar.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan tingkat pendidikan formal terakhir yang ditamatkan oleh seseorang dengan menjalani proses dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan yang lebih tinggi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rata-rata lama sekolah menurut Provinsi di pulau Jawa.

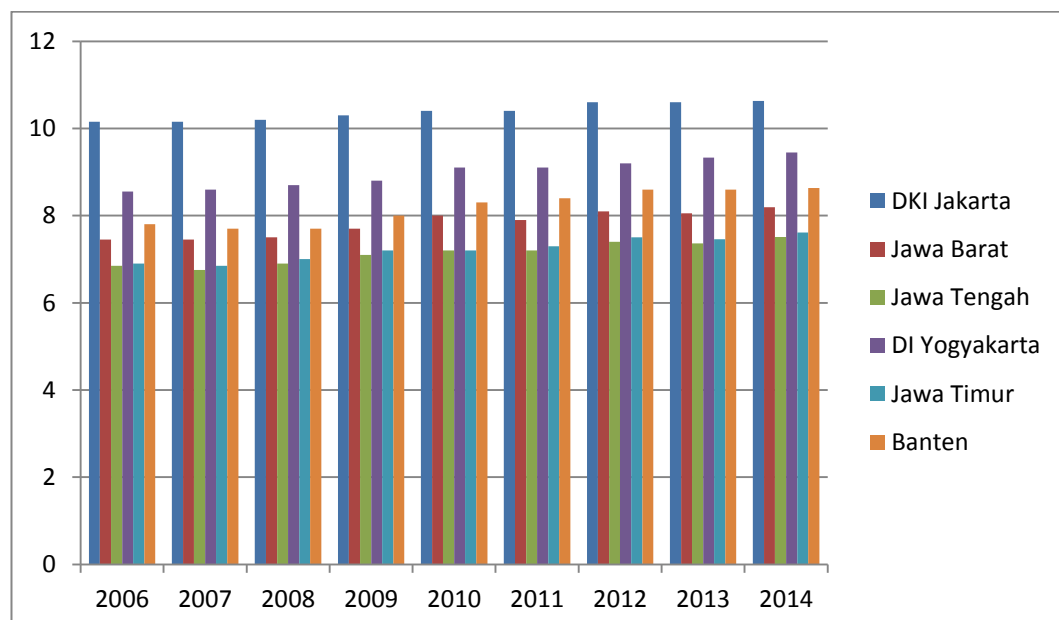
TABEL IV.2
Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) menurut Provinsi
di Pulau Jawa Tahun 2006-2014

PROVINSI	RATA-RATA LAMA SEKOLAH								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DKI Jakarta	10.15	10.15	10.20	10.30	10.40	10.40	10.60	10.60	10.63
Jawa Barat	7.45	7.45	7.50	7.70	8.00	7.90	8.10	8.05	8.19
Jawa Tengah	6.85	6.75	6.90	7.10	7.20	7.20	7.40	7.36	7.51
DI Yogyakarta	8.55	8.60	8.70	8.80	9.10	9.10	9.20	9.33	9.45
Jawa Timur	6.90	6.85	7.00	7.20	7.20	7.30	7.50	7.46	7.61
Banten	7.80	7.70	7.70	8.00	8.30	8.40	8.60	8.60	8.63

Sumber : BPS

Berdasarkan tabel IV.2 Tiga provinsi dengan rata-rata lama sekolah terendah pada tahun 2006 antara lain Jawa Tengah dengan angka 6,85 tahun, Jawa Timur dengan angka 6,90 tahun dan Jawa Barat 7,45 tahun. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2009 di pulau Jawa adalah 7,95 tahun atau setara dengan tingkat VII Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Rata-rata lama sekolah tertinggi pada tahun 2014 terdapat pada provinsi DKI Jakarta yaitu 10,63 persen, rata-rata lama sekolah tertinggi kedua berada pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 9,45 persen dan tertinggi ketiga terdapat pada provinsi Banten sebesar 8,63 persen. Angka rata-rata lama sekolah di pulau Jawa pada tahun 2014 adalah 8,67 persen atau setara dengan tingkat VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data tingkat pendidikan juga dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar IV.2
Rata-Rata Lama Sekolah menurut Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2006-2014

Gambar IV.2 menunjukkan rata-rata lama sekolah 6 provinsi di pulau Jawa cenderung mengalami peningkatan walaupun di provinsi Jawa Barat mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 0,10 persen dan pada tahun 2013 sebesar 0,05 persen. Di provinsi Jawa Timur juga sempat mengalami penurunan rata-rata lama sekolah sebesar 0,04 persen pada tahun 2013. Meskipun secara umum rata-rata lama sekolah di Pulau Jawa mengalami peningkatan, angka rata-rata lama sekolah di Pulau Jawa tetap dikategorikan belum cukup baik karena pada tahun 2014 angka rata-rata lama sekolah penduduk pulau Jawa adalah sebesar 8,67 persen, masih di bawah 9 tahun. Jauh dibawah program wajib belajar 12 tahun.

3. Upah Minimum

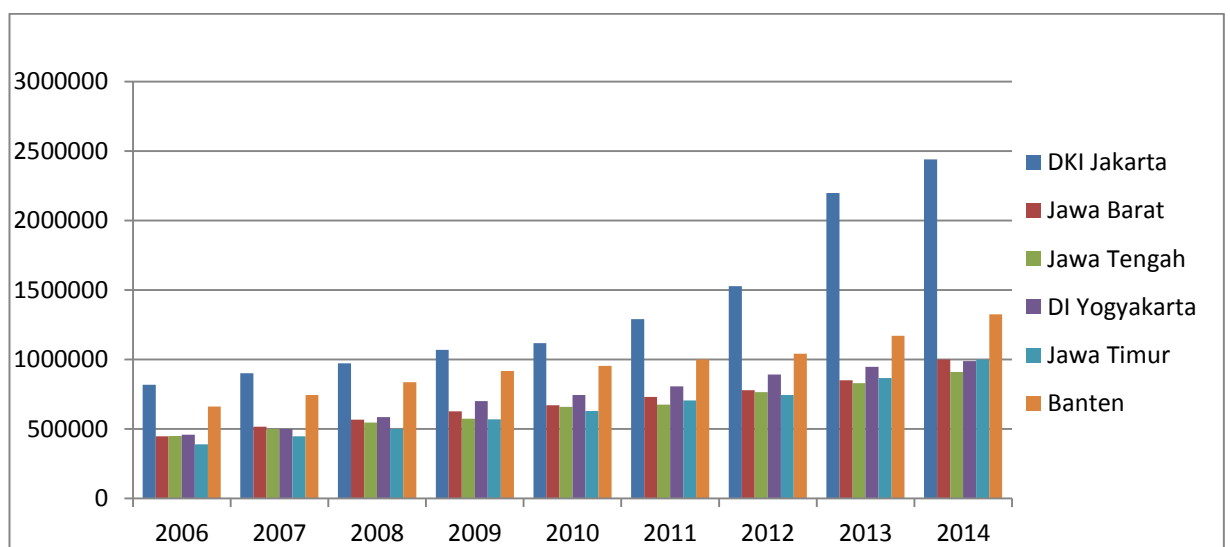
Upah minimum merupakan upah bulanan yang diterima pekerja sebagai balas jasa atas usahanya yang diberikan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum karyawannya berdasarkan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.

TABEL IV.3
Upah Minimum menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006-2014

Provinsi	Upah minimum provinsi (dalam Rp 000,-)								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dki Jakarta	819,1	900,6	972,6	1.069,9	1.118	1.290	1.529,2	2.200	2.441,3
Jawa Barat	447,65	516,3	568,2	628,2	671,5	732	780	850	1.000
Jawa Tengah	450	500	547	575	660	675	765	830	910
Di Yogyakarta	460	500	586	700	745,7	808	892	947,1	988,5
Jawa Timur	390	448,5	500	570	630	705	745	866,3	1.000
Banten	661,61	745,5	837	917,5	955,3	1.000	1.042	1.170	1.325

Sumber : BPS

Dalam penelitian ini menggunakan data upah minimum dari BPS dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan tabel tersebut. Tiga provinsi yang memiliki upah minimum terendah pada tahun 2006 adalah Jawa Timur Rp 390.000, upah minimum terendah kedua adalah provinsi Jawa Tengah sebesar Rp450.000, dan Jawa Barat sebesar Rp 447.650. Sedangkan provinsi yang memiliki upah minimum terbesar pada tahun 2014 terdapat pada provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2.441.301, kedua provinsi Banten sebesar Rp1.325.000, dan kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur sebesar Rp 1.000.000,- Data upah minimum juga dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar IV.3

Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa

Tahun 2006-2014

Gambar IV.3 menunjukkan upah minimum 6 provinsi di pulau Jawa cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang selalu mengalami peningkatan upah minimum yang cukup signifikan di setiap tahunnya, namun di beberapa provinsi peningkatan

upah minimum provinsi jumlahnya tidak terlalu besar. Hal tersebut karena peningkatan upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah mengikuti standar kebutuhan hidup layak (KHL) di masing-masing daerah.

Di setiap provinsi di pulau Jawa terdapat ketimpangan dalam pemberian upah minimum kepada tenaga kerja. Hal tersebut terjadi karena salah satunya disebabkan oleh perbedaan biaya kebutuhan hidup. Sehingga dapat disimpulkan walaupun upah minimum provinsi yang diterima tenaga kerja meningkat selama tahun 2006-2014, kenaikan tersebut tidak masih dibawah kebutuhan hidup layak terutama pada provinsi Jawa tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

B. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dan diolah menggunakan *Eviews 8.0*. kelebihan dari program ini adalah kemampuannya dalam mengolah data panel menjadi lebih mudah, karena dapat diperlakukan sebagai data *cross section*, *time series*, maupun sebagai data panel. Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman yang telah peneliti lakukan maka peneliti memutuskan untuk menggunakan persamaan regresi data panel dengan model random effect dalam penelitian ini.

1. Uji Prasyarat Analisis

Uji persyaratan analisis harus dilakukan terlebih dahulu sebagai syarat untuk melakukan analisis regresi berganda. Uji persyaratan analisis dilakukan terhadap data tiga variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan dan upah minimum yang merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik tahun 2006 sampai dengan 2014.

a. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data, uji ini dilakukan guna mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan uji statistik. *Jarque-Bera* dengan menggunakan *software eviews 8.0*. Model dianggap berdistribusi normal bila probabilitas *Jarque-Bera* hitung lebih dari 0,05.

Untuk mengetahui normalitas data masing-masing variabel dapat dilakukan dengan statistik deskriptif melalui *software eviews8.0*. Berikut tampilan hasil statistik deskriptif dari data variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel IV.4
Statistik Deskriptif

	KMS	TP	UMP
Mean	14.39333	2.100926	13.56593
Median	15.27500	2.070000	13.55000
Maximum	15.85000	2.360000	14.70000
Minimum	12.65000	1.900000	12.87000
Std. Dev.	1.194344	0.136427	0.375643
Skewness	-0.147315	0.544532	0.667512
Kurtosis	1.196346	2.151765	3.895000
Jarque-Bera	5.514943	4.287514	5.812459
Probability	0.058343	0.117214	0.054682
Sum	777.2400	113.4500	732.5600
Sum Sq. Dev.	75.60220	0.986454	7.478704
Observations	54	54	54

Dari tabel diatas menunjukkan $p\text{-value Jarque Bera} > 0,05$. Kemudian nilai $Jarque Bera > \text{tabel } chi\text{ square}$ dengan $df\ 2$ pada taraf signifikansi $0,05$ sebesar $5,99146$. Dengan demikian H_0 diterima yang artinya residual terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan Uji Harvey dengan hipotesis sebagai berikut:

- a. H_0 : Varians error bersifat homoskedastisitas
- b. H_1 : Varians error bersifat heteroskedastisitas

Tabel IV. 5

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.079564	Prob. F(2,51)	0.9236
Obs*R-squared	0.167964	Prob. Chi-Square(2)	0.9194
Scaled explained SS	0.158919	Prob. Chi-Square(2)	0.9236

Data Olahan eviews 8.0

Berdasarkan metode White yang dilakukan pada model Y menunjukkan $p\text{-value Prob Chi Squared}$ adalah $0,9236$ yang lebih besar dari $0,05$ maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh heteroskedastisitas, dengan demikian residual pada model tersebut dapat dikatakan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

3. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik dalam analisis data panel dilakukan dengan Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk menentukan apakah model

yang tepat dari persamaan tersebut *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Sedangkan *Uji Hausman* dilakukan untuk menentukan apakah model yang tepat dari persamaan tersebut *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

a. Pengujian Signifikansi *Common Effect/Fixed Effect*

Signifikansi model *Common Effect* atau *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan uji Chow. Pada persamaan dilakukan regresi data penl dengan menggunakan *estimation method* di dalam *Eviews* dipilih *cross section* dengan *fixed*. Setelah itu dilakukan *uji chow (redundant fixed effect)* untuk menentukan model yang tepat, *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Hipotesis yang digunakan dalam *Uji Chow* adalah sebagai berikut :

Hipotesis

- a. H_0 : Model *Common Effect*
- b. H_1 : Model *Fixed Effect*

Dalam hal ini menggunakan alpha sebesar 5% (0,05) dengan ketentuan menolak H_0 jika nilai probabilitas *chi-square* $< 0,05$, maka menandakan hasilnya signifikan dan model yang tepat *fixed Effect*. Namun apabila pada *uji chow* ini hasil probabilitas *chi-square* $> 0,05$ maka menandakan bahwa hasilnya tidak signifikan dan model yang tepat adalah *Common Effect*. Dari hasil pengujian dengan *Eviews 8.0*. diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel IV.6

Pengujian Signifikansi *Common Effect/Fixed Effect*

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	23.285602	(5,46)	0.0000
Cross-section Chi-square	68.126049	5	0.0000

Data Olahan Eviews 8.0

Berdasarkan hasil pengujian dengan *Eviews 8.0*, karena *p-value* *cross section/ period* Chi-Square $0,000 < 0,05$ atau nilai *probability (p-value) F Test* $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak yang artinya model yang tepat adalah model *Fixed effect* lalu dilanjutkan ke Uji Hausman.

c. Pengujian Signifikansi *Fixed Effect/Random Effect*

Signifikansi model *Fixed Effect* atau *Random Effect* dilakukan dengan Uji Hausman. Pada Uji Hausman ini estimation method dipilih *cross section* dengan *random*. Hipotesis yang digunakan dalam Uji Hausman adalah sebagai berikut :

Hipotesis

H_0 : Model *random effect*

H_1 : Model *fixed effect*

H_0 ditolak apabila nilai *p-value* $< \alpha$. Dalam hal ini menggunakan α sebesar 5% (0,05). Dengan demikian apabila hasil probabilitas chi-square $< 0,05$ maka menandakan hasilnya signifikan dan model yang cocok adalah *fixed effect*.

Namun apabila *Uji Hausman* menghasilkan nilai probabilitas *chi-square* $> 0,05$ maka menandakan bahwa hasilnya tidak signifikan dan model yang tepat adalah *Random Effect*. Hasil *Uji Hausman* terlihat sebagai berikut :

Tabel IV.7

Pengujian Signifikansi *Fixed Effect/Random Effect*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.359519	2	0.1864

Data Olahan Eviews 8.0

Dari hasil perhitungan didapat nilai *p-value period random* (0,1864) $>$ dari alpha (0,05), maka kita menerima H_0 yang artinya model yang tepat adalah *Random Effect*.⁶⁹

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Keberartian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} ditentukan dengan tingkat signifikansi 5%.

Tabel IV.8

Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TP?	-5.650373	1.684093	-3.355143	0.0015
UMP?	-0.212441	0.259691	-2.047908	0.0020
C	26.43313	2.341804	11.28751	0.0000

Data Olahan Eviews 8.0

⁶⁹ Sofyan Yamin, dkk. *Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda : Aplikasi dengan software SPSS, Eviews, Minitab, dan Statgraphics* (Jakarta: salemba empat,2011), p.199

Berdasarkan hasil uji t diatas, berikut ini disajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian Keberartian Koefisien Regresi Tingkat Pendidikan (X1) terhadap Kemiskinan (Y)

Berdasarkan perhitungan *Eviews 8.0* nilai t_{hitung} untuk koefisien regresi tingkat pendidikan adalah sebesar -5.650373 dibandingkan dengan t_{tabel} pada tabel distribusi t dengan $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (df) = $n-k-1$ atau $54-2-1=51$, hasilnya diperoleh t_{tabel} sebesar 2,00758.

Dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} terlihat bahwa t_{hitung} (5,635147) > t_{tabel} (2,00758) yang berarti H_0 ditolak, selain itu jika dilihat dari nilai probabilitas signifikannya, maka nilai signifikan dari tingkat pendidikan (0,0015) < (0,05). Sehingga dapat ditarik kesimpulan, yaitu secara parsial tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

2. Pengujian Keberartian Koefisien Regresi Upah Minimum (X2) terhadap Kemiskinan (Y)

Dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} terlihat bahwa t_{hitung} (2,047908) > t_{tabel} (2,00758) yang berarti H_0 ditolak, selain itu jika dilihat dari nilai probabilitas signifikannya, maka nilai signifikan dari upah minimum (0.0020) < (0,05). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial upah minimum berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

b. Uji Keberartian Regresi (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan secara simultan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.

Ketentuan penerimaan hipotesis secara simultan yaitu dengan melihat nilai probabilitas signifikansi. Selain itu dapat juga menggunakan perhitungan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$ df_1 (jumlah variabel-1) dan df_2 ($n-k-1$) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independen. Hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 9
Hasil Uji F

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.591829	0.7698
Idiosyncratic random		0.323632	0.2302
Weighted Statistics			
R-squared	0.361809	Mean dependent var	2.581061
Adjusted R-squared	0.336782	S.D. dependent var	0.402658
S.E. of regression	0.327917	Sum squared resid	5.484018
F-statistic	14.45667	Durbin-Watson stat	1.210031
Prob(F-statistic)	0.000011		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.720056	Mean dependent var	14.39333
Sum squared resid	21.16436	Durbin-Watson stat	0.313538

Data Olah an Eviews 8.0

Berdasarkan perhitungan Eviews 8.0 diketahui bahwa F_{hitung} (14,45667) > F_{tabel} (3,18) dari tabel nilai kritis distribusi F dengan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$, dan nilai $df_1 = 2$ dan $df_2 = 51$. Selain itu dapat dilihat nilai probabilitas signifikansinya adalah sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Berdasarkan dua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil analisis koefisien korelasi berdasarkan output Eviews 8.0 diperoleh nilai R^2 sebesar 0,361 maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel independen mampu menjelaskan keragaman nilai pada variabel kemiskinan sebesar 36,1 %, dan selebihnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang berada di luar model penelitian.

C. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan tahapan dan perhitungan yang telah dilakukan pada periode waktu tahun 2006 sampai dengan 2014 terhadap kemiskinan pada enam provinsi di pulau Jawa, untuk mengetahui apakah ada pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan, peneliti dalam hal ini menggunakan estimasi model *Random Effect*. Penelitian ini mempunyai persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{LnKMS} = 26,43313 - 5,650373\text{LnTP} - 0,212441\text{LnUMP}$$

Hasil persamaan regresi diatas memiliki nilai konstanta sebesar 26,43313 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ketika tingkat pendidikan dan upah minimum adalah nol, maka tingkat kemiskinan di pulau Jawa sebesar 26,43313 persen. Sedangkan untuk koefisien TP memiliki nilai 5,650373 maka dapat diinterpretasikan bahwa ketika TP atau tingkat pendidikan naik 1% dengan asumsi *ceteris paribus*, maka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 5,650373 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh negatif variabel TP terhadap kemiskinan.

Sama halnya dengan variabel tingkat pendidikan, variabel upah minimum juga memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Nilai koefisien variabel upah minimum 0,212441 dapat diinterpretasikan bahwa ketika jumlah upah minimum naik 1% dengan asumsi *ceteris paribus*, maka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,212441 persen.

Hasil perhitungan $t_{\text{statistik}}$ pada tingkat pendidikan (TP) terlihat bahwa $t_{\text{statistik}}$ sebesar $5,650373 > 2,00758 t_{\text{tabel}}$ yang berarti tingkat pendidikan secara signifikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, dengan nilai t-hitung yang bernilai negatif (-5,650373) dan probability 0,0015. Hal ini dapat diartikan, bahwa jika tingkat pendidikan meningkat maka kemiskinan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Menurut Mohammad Ali pendidikan berperan penting tidak hanya untuk meraih keberhasilan pembangunan yang menghargai lingkungan tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Darma Rika S, Munawaroh, dan Dita Puruwita dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan per Kapita, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Variabel berikutnya adalah upah minimum. Nilai koefisien variabel upah minimum sebesar 0,212441 dapat diinterpretasikan bahwa setiap ada peningkatan 1 persen dari variabel upah minimum dengan asumsi *ceteris paribus*, maka

kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,212441persen. Sementara itu hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} pada variabel upah minimum terlihat bahwa $t_{hitung} (2,047908) > t_{tabel} (2,00758)$. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh variabel upah minimum terhadap kemiskinan. Dengan nilai t_{hitung} yang bernilai negatif (-2,047908) dan probability 0,020 maka dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap kemiskinan di pulau jawa.

Hasil tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Menurut Kaufman dan Bruce mengungkapkan bahwa “semakin tinggi tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terbebas dari kemiskinan”. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Istifaiyah dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila adalah pertumbuhan ekonomi dan upah minimum.

Dari hasil regresi didapatkan pula karakteristik tingkat kemiskinan antar provinsi yang tercermin pada nilai *intercept* masing-masing provinsi, yaitu sebagai berikut :

Tabel IV.10
***Intercept* Tingkat Kemiskinan Provinsi**
Di Pulau Jawa

Provinsi	<i>Intercept</i>
_DKIJAKARTA--C	-0.242697
_JAWABARAT--C	0.687468
_JAWATENGAH--C	0.333101
_DIY—C	-0.342741
_JAWATIMUR--C	0.427269
_BANTEN—C	-0.862400

Data Olahan E-Views

Dari tabel dapat dilihat adanya variasi dari *intercept* masing-masing provinsi. *Intercept* digunakan untuk menjelaskan perbedaan individu melalui variabel dependen. Persamaan regresi berganda memiliki nilai *intercept* yang artinya jika X1 dan X2 berada pada nilai terendah, maka Y akan mengalami pertumbuhan sebesar nilai *intercept* tersebut. Dimana dalam *intercept* yang ditunjukkan pada pada tabel terdapat ketidakmerataan kemiskinan antar provinsi di pulau jawa.

Perbedaan nilai *intercept* enam provinsi secara statistik yakni 26,190433 untuk provinsi DKI Jakarta dimana dari hasil output eviews diatas dihitung dengan menambahkan koefisien konstanta $(26,43313+(-0.242697))$. Kemudian untuk provinsi Jawa Barat nilai *interceptnya* sebesar 27,120598. Untuk provinsi Jawa Tengah sebesar 26,766231. Lalu untuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nilai *interceptnya* sebesar 26,090389. Sebesar 26,860399 untuk provinsi Jawa Timur dan *intercept* Provinsi Banten sebesar 25,57073.

Tanda positif berarti daerah tersebut memiliki nilai kemiskinan yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdapat dalam model (tingkat pendidikan dan upah minimum) sementara tanda negatif berarti daerah tersebut tingkat kemiskinannya tergantung kepada variabel model.

Secara simultan dengan pengujian F_{hitung} dibandingkan F_{tabel} diperoleh nilai $F_{hitung} = (14,45667) > F_{tabel} (3,18)$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dengan tingkat keyakinan 95% tingkat pendidikan dan upah minimum berpengaruh secara bersama-sama terhadap kemiskinan pada pulau Jawa. Sementara R^2 juga menunjukkan angka sebesar 0,361 atau sebesar 36,1% model penelitian ini dikatakan baik.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang terdiri dari enam provinsi di Pulau Jawa selama enam tahun yaitu tahun 2006 sampai tahun 2014, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2006 sampai tahun 2014.
2. Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di pulau Jawa tahun 2006-2014.
3. Tingkat pendidikan dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

B. IMPLIKASI

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, implikasinya adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Meningkatnya tingkat pendidikan akan menurunkan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.

2. Upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di pulau Jawa. Meningkatnya upah minimum akan menurunkan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.

C. SARAN

Setelah mengadakan penelitian dan memperoleh hasilnya, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan mampu mensukseskan program wajib belajar 12 tahun secara merata, sehingga semua masyarakat di pulau Jawa memiliki kesempatan untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin serta meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan secara merata tidak hanya terpusat di suatu daerah tetapi merata ke seluruh daerah khususnya daerah yang terdalam dan jauh dari jangkauan pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah setempat diharapkan lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja melalui peningkatan upah minimum provinsi di masing-masing daerah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Karena diharapkan dengan upah minimum yang ada di suatu daerah dapat melindungi para pekerjanya dari kemiskinan. Dengan adanya upah minimum seorang pekerja akan menerima upah yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisu, Edytus .*Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung : Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR,Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat.* Jakarta: Forum Sahabat.2008.
- Ali, Mohammad. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional.* Jakarta: Grasindo. 2009.
- Ariefianto, Moch Doddy. *Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews* Jakarta: Erlangga. 2010.
- Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta. 2010.
- Badan Pusat Statistik. *Perhitungan dan Anaisis Kemiskinan Makro Indonesia.* Jakarta: 2011.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Upah 2010.* Jakarta : BPS, 2010.
- Bruce, Kaufaman. *The Economics of Labor Markets, Fifth Edition.* New York: The Dryden Press. 2000.
- Daryanto, Arief dan Yundy Hafizrianda. *Model-Model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Konsep dan Aplikasi.* Bogor: PT Penerbit IPB Press. 2010.
- Effendi, Nury dan Maman Setiawan. *Ekonometrika Pendekatan Teori dan terapan.* Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Fair, Karl edan Ray C. *Prinsip-Prinsip Ekonomi, suntingan Y. Andi Zaimur.* Jakarta: Erlangga. 2007.

- Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 2013.
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius. 2003.
- Gujarati, Damodar. *Basic Econometric*. London: Mc.Graw-Hill, Inc. 1988.
- Hardjo, Antonio Pradjasto dkk. *Mendahulukan Si Miskin, Buku Sumber Bagi Anggaran Pro Rakyat*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara. 2008.
- Kasim, Muslim. *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia & Strategi penanggulangannya, Studi Kasus: Padang Pariaman*. Jakarta: PT Indomedia Global. 2006.
- Mankiw, N.Gregory. *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2003.
- *MakroEkonomi*. Jakarta : Erlangga. 2006.
- Nur, Hadi. *et al. Proceedings, Integrating Knowledge With Science and Religion*. Johor : Ibnu Sina Institutes for Fundamental Science Studies. 2014.
- Rahardjo, Dawam. *Menuju Indonesia Sejahtera*. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES. 2006.
- Saydam, Gouzali. *Manajemen Sumber Daya Manusia- Suatu pendekatan Mikro*. Jakarta: Djambatan. 2005.
- Sriyana, Jaka. *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonisia. 2014.

Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Sumarsono, Sonny . *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Graha Ilmu. 2009.

Susanto, Hari. *Dinamika Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Khanata-Pustaka LP3ES Indonesia. 2006 .

Suyono, Haryono. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 2005.

Tambunan, Tulus T.H. *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indoonesia. 2003.

Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ke Tujuh. Jakarta: Erlangga. 2000.

_____ *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Salemba Empat. 2011.

UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2003.

Widarjono, Agus. *Ekonometrika*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2013.

Winarno. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.

_____ *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2009.

Sumber Jurnal

Darma Rika S, Munawaroh, dan Dita Puruwita, “*Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan per Kapita, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta*”, *Econo Sains* Volume X, Nomor 2, Agustus 2012.

Putu Seruni Pratiwi Sudiharta, dan Ketut Sutrisna. “*Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan, dan Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali.*” ISSN : 2303-0178

Radhitya Widyasworo, “*Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan TPAK Wanita terhadap Kemiskinan di Kabupaten Gresik (Studi Kasus Tahun 2008-2012)*”.

Lailatul Istifaiyah, “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013)*”

Sumber Internet:

Annisa Rahmayanti. *Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia*. Kompasiana. 2015.
http://www.kompasiana.com/nissa96/pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia_5528dc9ff17e61a3118b45b4, diakses pada 2 Mei 2015.

APBN News. *Berapa Anggaran Pendidikan Pada APBN-2015?*.
<http://apbnnews.com/artikel-opini/anggaran-pendidikan-apbnp-2015/>, diakses pada 12 Mei 2015.

bps.go.id. “*Indeks Pembangunan Manusia*”.
<http://bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1>, diakses pada 10 Juni 2015.

bps.go.id. *Tenaga Kerja, TPAK*
<http://bps.go.id/Subjek/view/id/6#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1>, diakses pada 15 Juni 2015.

Fatkul Maskur. *10 Provinsi Dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi 2013*.
Bisnis.com. 2013

<http://industri.bisnis.com/read/20130901/12/160039/inilah-10-provinsi-dengan-tingkat-pengangguran-tertinggi>, diakses pada 1 Juni 2015.

Gajimu.com. *Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014*. 2014.

<http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-minimum/ump-2014>, diakses pada 2 Juni 2015).

Nurseffi Dwi Wahyuni. *Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia*.
Liputan6com. 2015

<http://bisnis.liputan6.com/read/2138489/daftar-lengkap-ump-2015-di-seluruh-indonesia>, diakses pada 2 Juni 2015.

Lampiran 1

Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006-2014

PROVINSI	TAHUN	KMS	TP	UMP
DKI JAKARTA	2006	407100	10.15	819100
DKI JAKARTA	2007	405700	10.15	900600
DKI JAKARTA	2008	379600	10.20	972600
DKI JAKARTA	2009	323200	10.30	1069900
DKI JAKARTA	2010	312200	10.40	1118000
DKI JAKARTA	2011	363420	10.40	1290000
DKI JAKARTA	2012	363200	10.60	1529200
DKI JAKARTA	2013	354190	10.60	2200000
DKI JAKARTA	2014	393980	10.63	2441301
JAWA BARAT	2006	5712500	7.45	447654
JAWA BARAT	2007	5457900	7.45	516300
JAWA BARAT	2008	5322400	7.50	568200
JAWA BARAT	2009	4983600	7.70	628200
JAWA BARAT	2010	4773700	8.00	671500
JAWA BARAT	2011	4648630	7.90	732000
JAWA BARAT	2012	4477500	8.10	780000
JAWA BARAT	2013	4297040	8.05	850000
JAWA BARAT	2014	4327070	8.19	1000000
JAWA TENGAH	2006	7100600	6.85	450000
JAWA TENGAH	2007	6557200	6.75	500000
JAWA TENGAH	2008	6189600	6.90	547000
JAWA TENGAH	2009	5725700	7.10	575000
JAWA TENGAH	2010	5369200	7.20	660000
JAWA TENGAH	2011	5107360	7.20	675000
JAWA TENGAH	2012	4977400	7.40	765000
JAWA TENGAH	2013	4732950	7.36	830000
JAWA TENGAH	2014	4836450	7.51	910000
DI YOGYAKARTA	2006	713990	8.55	460000
DI YOGYAKARTA	2007	633500	8.60	500000
DI YOGYAKARTA	2008	616300	8.70	586000
DI YOGYAKARTA	2009	585800	8.80	700000
DI YOGYAKARTA	2010	577300	9.10	745700

DI YOGYAKARTA	2011	560880	9.10	808000
DI YOGYAKARTA	2012	565300	9.20	892700
DI YOGYAKARTA	2013	550190	9.33	947100
DI YOGYAKARTA	2014	544870	9.45	988500
JAWA TIMUR	2006	7678100	6.90	390000
JAWA TIMUR	2007	7155300	6.85	448500
JAWA TIMUR	2008	6651300	7.00	500000
JAWA TIMUR	2009	6022600	7.20	570000
JAWA TIMUR	2010	5529300	7.20	630000
JAWA TIMUR	2011	5356210	7.30	705000
JAWA TIMUR	2012	5071000	7.50	745000
JAWA TIMUR	2013	4771260	7.46	866300
JAWA TIMUR	2014	4786790	7.61	1000000
BANTEN	2006	904300	7.80	661613
BANTEN	2007	886200	7.70	745500
BANTEN	2008	816700	7.70	837000
BANTEN	2009	788100	8.00	917500
BANTEN	2010	758200	8.30	955300
BANTEN	2011	690490	8.40	1000000
BANTEN	2012	652800	8.60	1042000
BANTEN	2013	656240	8.60	1170000
BANTEN	2014	622840	8.63	1325000

Lampiran 2: Data Ln Variabel Penelitian

Ln Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006-2014

PROVINSI	TAHUN	KMS	TP	UMP
DKI JAKARTA	2006	12.91	2.31	13.61
DKI JAKARTA	2007	12.91	2.31	13.71
DKI JAKARTA	2008	12.84	2.32	13.78
DKI JAKARTA	2009	12.68	2.33	13.88
DKI JAKARTA	2010	12.65	2.34	13.92
DKI JAKARTA	2011	12.8	2.34	14.07
DKI JAKARTA	2012	12.8	2.36	14.24
DKI JAKARTA	2013	12.77	2.36	14.6
DKI JAKARTA	2014	12.88	2.36	14.7
JAWA BARAT	2006	15.55	2	13.01
JAWA BARAT	2007	15.51	2	13.15
JAWA BARAT	2008	15.48	2.01	13.25
JAWA BARAT	2009	15.42	2.04	13.35
JAWA BARAT	2010	15.37	2.07	13.41
JAWA BARAT	2011	15.35	2.06	13.5
JAWA BARAT	2012	15.31	2.09	13.56
JAWA BARAT	2013	15.27	2.08	13.65
JAWA BARAT	2014	15.28	2.1	13.81
JAWA TENGAH	2006	15.77	1.92	13.01
JAWA TENGAH	2007	15.69	1.9	13.12
JAWA TENGAH	2008	15.64	1.93	13.21
JAWA TENGAH	2009	15.56	1.96	13.26
JAWA TENGAH	2010	15.49	1.97	13.39
JAWA TENGAH	2011	15.44	1.97	13.42
JAWA TENGAH	2012	15.42	2	13.54
JAWA TENGAH	2013	15.37	1.99	13.62
JAWA TENGAH	2014	15.39	2.01	13.72
DI YOGYAKARTA	2006	15.78	2.14	13.03
DI YOGYAKARTA	2007	13.36	2.15	13.12
DI YOGYAKARTA	2008	13.33	2.16	13.28
DI YOGYAKARTA	2009	13.28	2.17	13.45
DI YOGYAKARTA	2010	13.26	2.2	13.52
DI YOGYAKARTA	2011	13.23	2.2	13.6

DI YOGYAKARTA	2012	13.24	2.21	13.7
DI YOGYAKARTA	2013	13.21	2.23	13.76
DI YOGYAKARTA	2014	13.2	2.24	13.8
JAWA TIMUR	2006	15.85	1.93	12.87
JAWA TIMUR	2007	15.78	1.92	13.01
JAWA TIMUR	2008	15.71	1.94	13.12
JAWA TIMUR	2009	15.61	1.97	13.25
JAWA TIMUR	2010	15.52	1.97	13.35
JAWA TIMUR	2011	15.49	1.98	13.46
JAWA TIMUR	2012	15.43	2.01	13.52
JAWA TIMUR	2013	15.37	2	13.67
JAWA TIMUR	2014	15.38	2.02	13.81
BANTEN	2006	13.71	2.05	13.4
BANTEN	2007	13.69	2.04	13.52
BANTEN	2008	13.61	2.04	13.63
BANTEN	2009	13.57	2.07	13.72
BANTEN	2010	13.53	2.11	13.76
BANTEN	2011	13.44	2.12	13.81
BANTEN	2012	13.38	2.15	13.85
BANTEN	2013	13.39	2.15	13.97
BANTEN	2014	13.34	2.15	14.09

Lampiran 3

Hasil Uji Normalitas

Statistik Deskriptif

	KMS	TP	UMP
Mean	14.39333	2.100926	13.56593
Median	15.27500	2.070000	13.55000
Maximum	15.85000	2.360000	14.70000
Minimum	12.65000	1.900000	12.87000
Std. Dev.	1.194344	0.136427	0.375643
Skewness	-0.147315	0.544532	0.667512
Kurtosis	1.196346	2.151765	3.895000
Jarque-Bera	5.514943	4.287514	5.812459
Probability	0.058343	0.117214	0.054682
Sum	777.2400	113.4500	732.5600
Sum Sq. Dev.	75.60220	0.986454	7.478704
Observations	54	54	54

Lampiran 4

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.079564	Prob. F(2,51)	0.9236
Obs*R-squared	0.167964	Prob. Chi-Square(2)	0.9194
Scaled explained SS	0.158919	Prob. Chi-Square(2)	0.9236

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/19/16 Time: 01:41

Sample: 2006 2059

Included observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.762613	1.273025	0.599056	0.5518
TP^2	0.051355	0.162714	0.315614	0.7536
UMP^2	-0.003666	0.009230	-0.397204	0.6929
R-squared	0.003110	Mean dependent var		0.315043
Adjusted R-squared	-0.035983	S.D. dependent var		0.463178
S.E. of regression	0.471438	Akaike info criterion		1.387895
Sum squared resid	11.33494	Schwarz criterion		1.498394
Log likelihood	-34.47315	Hannan-Quinn criter.		1.430510
F-statistic	0.079564	Durbin-Watson stat		0.996283
Prob(F-statistic)	0.923633			

Lampiran 6

Regresi Data Panel dengan Model *Common Effect*

Dependent Variable: KMS?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/19/16 Time: 02:28

Sample: 2006 2014

Included observations: 9

Cross-sections included: 6

Total pool (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TP?	-7.305964	0.851255	-8.582576	0.0000
UMP?	-0.194984	0.309161	-0.630688	0.5311
C	32.38776	3.136735	10.32531	0.0000
R-squared	0.774976	Mean dependent var		14.39333
Adjusted R-squared	0.766151	S.D. dependent var		1.194344
S.E. of regression	0.577560	Akaike info criterion		1.793943
Sum squared resid	17.01234	Schwarz criterion		1.904442
Log likelihood	-45.43647	Hannan-Quinn criter.		1.836559
F-statistic	87.82101	Durbin-Watson stat		0.403299
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 7

Regresi Data Panel dengan Model *Fixed Effect*

Dependent Variable: KMS?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/19/16 Time: 02:29

Sample: 2006 2014

Included observations: 9

Cross-sections included: 6

Total pool (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TP?	-2.819114	2.457994	-1.146916	0.2573
UMP?	-0.288184	0.319266	-0.902644	0.3714
C	24.22556	2.656416	9.119641	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_DKIJAKARTA--C	-0.782885			
_JAWABARAT--C	0.811499			
_JAWATENGAH--C	0.684769			
_DIY--C	-0.628706			
_JAWATIMUR--C	0.746707			
_BANTEN--C	-0.831383			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.936273	Mean dependent var	14.39333	
Adjusted R-squared	0.926575	S.D. dependent var	1.194344	
S.E. of regression	0.323632	Akaike info criterion	0.717535	
Sum squared resid	4.817936	Schwarz criterion	1.012199	
Log likelihood	-11.37345	Hannan-Quinn criter.	0.831176	
F-statistic	96.54626	Durbin-Watson stat	1.328900	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 8

Regresi Data Panel dengan Model *Random Effect*

Dependent Variable: KMS?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/19/16 Time: 02:29
 Sample: 2006 2014
 Included observations: 9
 Cross-sections included: 6
 Total pool (balanced) observations: 54
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TP?	-5.650373	1.684093	-3.355143	0.0015
UMP?	-0.212441	0.259691	-2.047908	0.0020
C	26.43313	2.341804	11.28751	0.0000
Random Effects (Cross)				
_DKIJAKARTA--C	-0.242697			
_JAWABARAT--C	0.687468			
_JAWATENGAH--C	0.333101			
_DIY--C	-0.342741			
_JAWATIMUR--C	0.427269			
_BANTEN--C	-0.862400			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.591829	0.7698
Idiosyncratic random			0.323632	0.2302
Weighted Statistics				
R-squared	0.361809	Mean dependent var		2.581061
Adjusted R-squared	0.336782	S.D. dependent var		0.402658
S.E. of regression	0.327917	Sum squared resid		5.484018
F-statistic	14.45667	Durbin-Watson stat		1.210031
Prob(F-statistic)	0.000011			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.720056	Mean dependent var		14.39333
Sum squared resid	21.16436	Durbin-Watson stat		0.313538

Lampiran 9

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	23.285602	(5,46)	0.0000
Cross-section Chi-square	68.126049	5	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: KMS?

Method: Panel Least Squares

Date: 01/19/16 Time: 02:29

Sample: 2006 2014

Included observations: 9

Cross-sections included: 6

Total pool (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TP?	-7.305964	0.851255	-8.582576	0.0000
UMP?	-0.194984	0.309161	-0.630688	0.5311
C	32.38776	3.136735	10.32531	0.0000
R-squared	0.774976	Mean dependent var		14.39333
Adjusted R-squared	0.766151	S.D. dependent var		1.194344
S.E. of regression	0.577560	Akaike info criterion		1.793943
Sum squared resid	17.01234	Schwarz criterion		1.904442
Log likelihood	-45.43647	Hannan-Quinn criter.		1.836559
F-statistic	87.82101	Durbin-Watson stat		0.403299
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 10

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.359519	2	0.1864

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
TP?	-2.819114	-5.650373	3.205566	0.1138
UMP?	-0.288184	-2.047908	0.054491	0.1376

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KMS?

Method: Panel Least Squares

Date: 01/19/16 Time: 02:30

Sample: 2006 2014

Included observations: 9

Cross-sections included: 6

Total pool (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.43313	2.656416	9.119641	0.0000
TP?	-5.650373	1.684093	-3.355143	0.0015
UMP?	-0.212441	0.259691	-2.047908	0.0020

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.936273	Mean dependent var	14.39333
Adjusted R-squared	0.926575	S.D. dependent var	1.194344
S.E. of regression	0.323632	Akaike info criterion	0.717535
Sum squared resid	4.817936	Schwarz criterion	1.012199
Log likelihood	-11.37345	Hannan-Quinn criter.	0.831176
F-statistic	96.54626	Durbin-Watson stat	1.328900
Prob(F-statistic)	0.000000		

RIWAYAT HIDUP



Silvia Andriani, anak perempuan dari pasangan Suwiji dan Mualifah, lahir di Magetan tanggal 29 Maret 1994. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dengan adik bernama Yunita Ratna Sari. Penulis menjalani pendidikan di bangku sekolah dasar dari tahun 1999 sampai dengan 2005 di MI Al-Mu'awanah Cibinong.

Kemudian meneruskan ke pendidikan lanjutan pertama dari tahun 2005 sampai dengan 2008 di SMP Eka Wijaya Cibinong. Lalu penulis melanjutkan pendidikan menengah di SMK Eka Wijaya Cibinong pada jurusan Akuntansi dari tahun 2008 dan lulus tahun 2011.

Setelah lulus SMK penulis diterima di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur SNMPTN tertulis dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi pada Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi yakni BSO KSEI (Kelompok Studi Ekonomi Islam) selama tiga kepengurusan. Diantaranya sebagai staff HRD pada masa kepengurusan 2012-2013, Wakil Kepala Biro Kestari pada masa kepengurusan 2013-2014, dan staff DPO pada masa kepengurusan 2014-2015.

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Koperasi Pegawai Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan pada bulan Juni tahun 2014 dan Praktik Kegiatan Mengajar di SMAN 103 Jakarta pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2014. Tahun 2015 sampai dengan 2016 penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2006-2014” untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.